



# LAPORAN KINERJA 2017

Balai POM di Pangkalpinang

 (0717) 439278

 [bpompp@gmail.com](mailto:bpompp@gmail.com)

 (0717) 434874

 @BPOMPkIPinang

## Kata Pengantar

---

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayat-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Kinerja Balai POM di Pangkalpinang tahun 2017 dapat diselesaikan. Laporan kinerja ini merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai Sasaran Strategis yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 yang merupakan tahun ketiga dalam periode Renstra 2015-2019.

Salah satu bukti komitmen pemerintah dalam upaya menerapkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara prinsip Inpres ini mengamanatkan model manajemen pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas saja, tetapi juga pada peningkatan kinerja. Dengan kata lain, timbul kewajiban bagi setiap instansi pemerintah untuk mengukur dan sekaligus menginformasikan capaian kinerjanya. Hal ini juga berarti bahwa instansi pemerintah diwajibkan untuk mengubah orientasi pelaporan dari kemampuan menyerap anggaran menjadi kemampuan untuk menunjukkan capaian kinerja *output* maupun *outcome*.

Balai POM di Pangkalpinang sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM RI mempunyai tugas utama untuk melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan produk, melakukan pengujian terhadap contoh obat dan makanan, serta memberikan pelayanan melalui Layanan Informasi Konsumen. Semua kegiatan tersebut dilakukan dalam mendukung visi dan misi Badan POM RI.

Pengukuran kinerja BPOM di Pangkalpinang dilakukan dengan penilaian terhadap pencapaian indikator – indikator kinerja. Pencapaian indikator kinerja belum dapat tercapai sepenuhnya tetapi terdapat peningkatan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Apabila dilihat dari indikator *output*, maka pencapaiannya telah mencapai target tahunan.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada Balai POM di Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan obat dan makanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja Balai POM di Pangkalpinang selama tahun 2017 agar memiliki kinerja yang lebih baik di masa akan datang.

Pangkalpinang, Februari 2017  
Kepala Balai POM di Pangkalpinang



Drs. Rossy Hertati, Apt., M.P.  
NIP. 19670107 199303 2 002

## Ikhtisar Eksekutif

---

Dalam Perjanjian Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang tahun 2016, untuk Program Pengawas Obat dan Makanan terdapat 3 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja utama dan 3 indikator kinerja yang relevan. Sasaran strategis dan indikator kinerja Program Pengawas Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :

- Sasaran strategis 1, Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan. Sasaran tersebut dengan indikator kinerja utama Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan target 93,0%, Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat dengan target 72%, Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat dengan target 89%, Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat dengan target 81% dan Persentase makanan yang memenuhi syarat dengan target 85,5%.
- Sasaran strategis 2, Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan. Indikator yang digunakan untuk sasaran kinerja tersebut adalah Tingkat Kepuasan Masyarakat dengan target 82% dan Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan dengan target 5 Kabupaten/Kota.
- Sasaran strategis 3, Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM dengan indikator Nilai SAKIP Balai POM di Pangkalpinang dari Badan POM dengan target nilai B.

Secara garis besar, pencapaian kinerja Balai POM di Pangkalpinang Tahun 2017 dari 3 sasaran strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis 1 dengan 5 indikator kinerja utama terdapat 4 indikator mencapai target dan 1 indikator tidak mencapai target. Sasaran strategis 2 terdapat 2 indikator dengan 2 indikator mencapai target. Sasaran strategis 3 terdapat 1 indikator kinerja yang mencapai target.

Satu indikator yang tidak memenuhi target yaitu persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat dengan capaian 76,47 % dari target yang ditetapkan sebesar 81,00 % atau capaian yang diperoleh adalah 97,35% sehingga termasuk kategori cukup. Target yang tidak tercapai tersebut antara lain disebabkan oleh perencanaan sampling yang lebih tajam dan tepat sasaran sehingga banyak ditemukan produk yang tidak memenuhi syarat (TMS), terlambatnya informasi *Public Warning* (PW) yang diterima Balai POM di Pangkalpinang sehingga terdapat beberapa produk yang masuk daftar PW sudah disampling dan diuji dan parameter uji terkait mutu pada tahun 2017 lebih banyak dan hasilnya sebagian besar tidak memenuhi syarat seperti contohnya penetapan kadar pengawet dan pemanis.

Untuk mengatasi masalah tersebut dan sebagai langkah antisipatif untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan atau rencana tindak lanjut antara lain; intensifikasi terhadap pengawasan suplemen kesehatan *Public Warning* (PW), peningkatan pembinaan dan penyebaran informasi terkait suplemen kesehatan yang memenuhi ketentuan dan penerapan sanksi baik administrasi maupun *pro justicia* terhadap sarana distribusi yang mengedarkan suplemen kesehatan Tanpa Izin Edar (TIE)/ *Public Warning* (PW).

Dengan pencapaian kinerja tersebut, Balai POM di Pangkalpinang telah melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan kinerja pada masa mendatang.

Secara umum, realisasi anggaran Balai POM di Pangkalpinang sudah cukup baik yaitu sebesar 87,86 % (sebelum *self blocking*) dan 94,97% (setelah *self blocking*). Untuk efisiensi kegiatan, dari 21 komponen kegiatan dan subkegiatan sebanyak 19 kegiatan dilaksanakan dengan efisien dengan tingkat efisiensi antara 0,00-0,98 dan 2 kegiatan diantaranya yang tidak efisien dalam pelaksanaannya yaitu Penyelidikan dan Penyidikan serta Pengadaan Bangunan dan Gedung (*self blocking*)

Beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Balai POM di Pangkalpinang antara lain adalah :

1. Perkuatan kapasitas dan kapabilitas SDM dan Laboratorium.
2. Memperketat pengawasan produk Obat dan Makanan terutama untuk produk yang tidak memenuhi syarat.
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat.
4. Perkuatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
5. Peningkatan penerapan sistem manajemen mutu QMS 9001 dan ISO 17025 secara konsisten dan berkesinambungan.
6. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor sehingga meningkatkan efektifitas pengawasan produk Obat dan Makanan.

Selanjutnya diharapkan semua pegawai di Balai POM di Pangkalpinang tetap memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kinerja masing-masing individu sehingga capaian kinerja Balai POM di Pangkalpinang dapat terus meningkat.

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Lampiran.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar .....	ix
<b>BAB I. Pendahuluan .....</b>	<b>. 1</b>
1.1 Gambaran Umum Organisasi.....	. 1
1.2 Struktur Organisasi .....	. 2
1.3 Aspek Strategis Organisasi .....	. 4
1.4 Analisis Lingkungan Stategis.....	. 4
1.5 Isu Strategis.....	. 8
<b>BAB II. Perencanaan Kinerja .....</b>	<b>11</b>
2.1 Rencana Strategis.....	11
2.2 Perjanjian Kinerja 2016 .....	13
2.3 Kriteria Pencapaian Indikator .....	18
<b>BAB III. Akuntabilitas Kinerja .....</b>	<b>19</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	19
3.2 Realisasi Anggaran .....	56
3.3 Analisis Efisiensi Kegiatan.....	58
<b>BAB IV. Penutup.....</b>	<b>61</b>

# LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Strategis Balai POM di Pangkalpinang Tahun 2015-2019

Lampiran 2. Rencana Kerja Tahunan Balai POM di Pangkalpinang Tahun 2017

Lampiran 3. Penetapan Kinerja Balai POM di Pangkalpinang Tahun 2017

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Balai POM di Pangkalpinang Tahun 2017

Lampiran 5. Pengukuran Kinerja Kegiatan Balai POM di Pangkalpinang Tahun  
2017

Lampiran 6. Pengukuran Efisiensi Kegiatan Balai POM di Pangkalpinang Tahun  
2017

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana Balai POM di Pangkalpinang .....	5
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Sasaran 1 .....	14
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Kegiatan yang Menunjang Sasaran 1 .....	15
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Sasaran 2.....	16
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Kegiatan yang Menunjang Sasaran 2 .....	16
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Sasaran 3 .....	17
Tabel 2.6 Indikator Kinerja Kegiatan yang Menunjang Sasaran 3 .....	17
Tabel 2.7 Kriteria Pengukuran Pencapaian Indikator .....	18
Tabel 3.1 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja TA 2017 .....	19
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1 Tahun 2017 .....	21
Tabel 3.3 Hasil Pengujian Sampel Balai POM di Pangkalpinang .....	35
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan .....	36
Tabel 3.5 Perkara Penyidikan Obat dan Makanan .....	42
Tabel 3.6 Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Pencapaian SS 2 .....	42
Tabel 3.7 Kab/Kota yang Mengalokasikan Anggaran dalam Pengawasan Obat dan Makanan.....	45
Tabel 3.8 Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis 2 .....	46
Tabel 3.9 Target dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 .....	50
Tabel 3.10 Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis 3 .....	51
Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Tiap Sasaran (Sebelum Self Blocking) .....	56
Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Tiap Sasaran (Setelah Self Blocking) .....	57

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai POM di Pangkalpinang .....	3
Gambar 1.2 Penyebaran Pegawai di Balai POM di Pangkalpinang .....	6
Gambar 1.3 Profil Pegawai berdasar Usia dan Golongan .....	6
Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Capaian Obat yang MS Tahun 2017 dan Capaian terhadap Target 2019 .....	22
Gambar 3.2 Grafik Perbandingan Realisasi Obat yang MS 2017 dengan Realisasi Tahun 2014,2015 dan 2016 beserta Target 2019.....	22
Gambar 3.3 Grafik Perbandingan Realisasi Obat yang MS Tahun 2017 Balai POM di Pangkalpinang dan Balai POM di Serang .....	23
Gambar 3.4 Grafik Perbandingan Capaian Obat Tradisional yang MS Tahun 2017 dan Capaian terhadap Target 2019 .....	24
Gambar 3.5 Grafik Perbandingan Realisasi Obat Tradisional yang MS 2017 dengan Realisasi Tahun 2014,2015 dan 2016 beserta Target 2019.....	25
Gambar 3.6 Grafik Perbandingan Realisasi Obat Tradisional yang MS Tahun 2017 Balai POM di Pangkalpinang dan Balai POM di Serang....	26
Gambar 3.7 Grafik Perbandingan Capaian Kosmetik yang MS Tahun 2017 dan Capaian terhadap Target 2019 .....	27
Gambar 3.8 Grafik Perbandingan Realisasi Kosmetik yang MS 2017 dengan Realisasi Tahun 2014,2015 dan 2016 beserta Target 2019.....	28
Gambar 3.9 Grafik Perbandingan Realisasi Kosmetik yang MS Tahun 2017 Balai POM di Pangkalpinang dan Balai POM di Serang.....	28
Gambar 3.10 Grafik Perbandingan Capaian Suplemen Kesehatan yang MS Tahun 2017 dan Capaian terhadap Target 2019 .....	30
Gambar 3.11 Grafik Perbandingan Realisasi Suplemen Kesehatan yang MS 2017 dengan Realisasi Tahun 2014, 2015 dan 2016 beserta Target 2019.....	30
Gambar 3.12 Grafik Perbandingan Realisasi Suplemen Kesehatan yang MS	

Tahun 2017 Balai POM di Pangkalpinang dan Balai POM di Serang.....	31
Gambar 3.13 Grafik Perbandingan Capaian Makanan yang MS Tahun 2017 dan Capaian terhadap Target 2019 .....	32
Gambar 3.14 Grafik Perbandingan Realisasi Makanan yang MS 2017 dengan Realisasi Tahun 2014,2015 dan 2016 beserta Target 2019.....	33
Gambar 3.15 Grafik Perbandingan Realisasi Makanan yang MS Tahun 2017 Balai POM di Pangkalpinang dan Balai POM di Serang.....	34
Gambar 3.16 Jumlah Layanan Publik Balai POM di Pangkalpinang .....	47

# BAB 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, dinyatakan bahwa Badan POM merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang mengkoordinasikan.

Sebagai tindak lanjut terbentuknya Badan POM, maka ditetapkan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM melalui Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor : 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM. Berdasar Surat Keputusan Kepala Badan POM No. HK.00.05.21.3546 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di atas, BPOM di Pangkalpinang termasuk Balai POM Tipe B

### A. Tugas Pokok dan Fungsi Balai POM Pangkalpinang

Kegiatan pengawasan obat dan makanan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat, akan tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, dari hulu sampai hilir.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 maka tugas pokok dan fungsi Balai POM di Pangkalpinang sebagai unit pelaksana teknis Badan POM di daerah adalah sebagai berikut :

## **1. Tugas Pokok**

Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapan, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya.

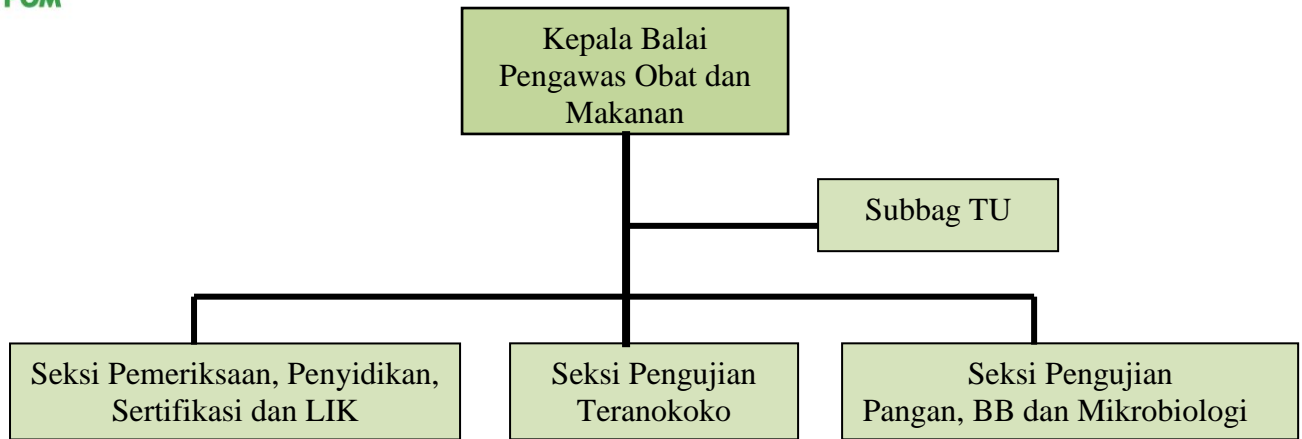
## **2. Fungsi Balai POM Pangkalpinang**

Adapun fungsi dari Balai POM Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan
- b. Pelaksanaan pengujian laboratorium dan penilaian mutu produk terapan, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan, bahan berbahaya dan mikrobiologi.
- c. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi.
- d. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
- e. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh kepala Badan.
- f. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.
- h. Evaluasi dan penyusunan laporan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan, sesuai dengan bidang tugasnya.

### **1.2 Struktur Organisasi**

Berdasar Surat Keputusan Kepala Badan POM No. HK.00.05.21.3546 Tahun 2009 tanggal 1 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM di Pangkalpinang termasuk Balai POM tipe B, dengan struktur organisasi sebagai berikut



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai POM di Pangkalpinang**

Adapun tugas masing-masing seksi adalah :

1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan, penganggaran, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Balai POM di Pangkalpinang, memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.
2. Seksi Pengujian Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pengujian secara laboratorium, serta melaksanakan pengujian dan penilaian mutu dibidang produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.
3. Seksi Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pengujian secara laboratorium, serta melaksanakan pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan, bahan berbahaya dan mikrobiologi.
4. Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan

pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran di bidang Produk Terapeutik, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk Komplemen, Pangan dan Bahan Berbahaya, melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan informasi konsumen.

### **1.3 Aspek Strategis Organisasi**

Berdasarkan pada peta strategi Badan POM, pengawasan Obat dan Makanan mempunyai dua *outcome*, yaitu meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan yang aman untuk meningkatkan kesehatan masyarakat serta terciptanya iklim inovasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan upaya yang cukup strategis karena berdampak langsung pada perlindungan konsumen serta menjadi unsur penting dalam upaya meningkatkan daya saing produk di tingkat daerah dan nasional. Atas dasar tersebut, Balai POM di Pangkalpinang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM mempunyai peran strategis dalam pencapaian *outcome* tersebut, terlebih dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, untuk menguatkan pengawasan dari berbagai lini diperlukan koordinasi yang baik dengan lintas sektor terkait sehingga pengawasan dapat lebih optimal.

### **1.4 Analisis Lingkungan Strategis**

#### **A. Internal**

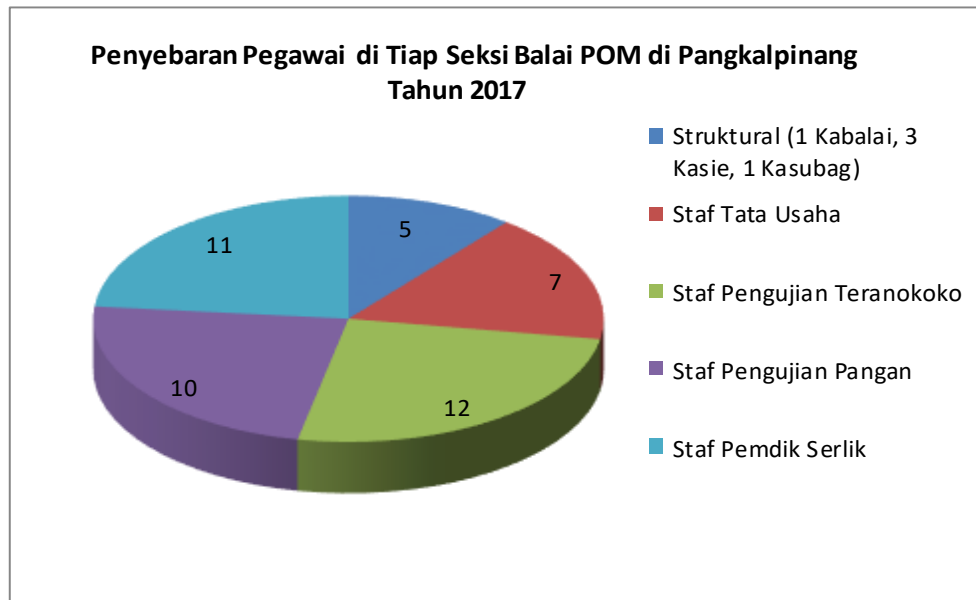
BPOM di Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan obat dan makanan didukung oleh sumber daya yang memadai baik segi sumber daya manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana. Pada tahun 2017, Balai POM di Pangkalpinang mendapatkan anggaran sebesar Rp

14.921.792.000, besarnya anggaran ini meningkat sebesar 12,29 % bila dibandingkan dengan anggaran yang diterima pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 13.086.437.000. Peningkatan anggaran yang diberikan ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kualitas dalam pengawasan dan pelayanan yang dilakukan oleh Balai POM di Pangkalpinang.

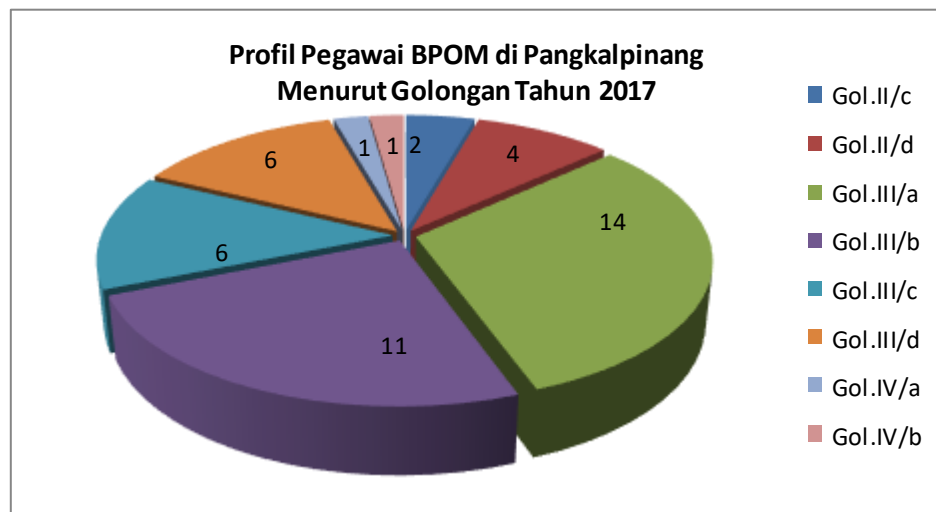
	Luas Tanah & Bangunan	Rumah Dinas	Penerangan	Sarana Komunikasi
Balai POM di Pangkalpinang	<b>L.Tanah</b> 5503 m <sup>2</sup> <b>L.Bangunan</b> 2075 m <sup>2</sup> <b>Luas Kantor</b> 780 m <sup>2</sup> <b>Luas Laboratorium</b> 1295 m <sup>2</sup>	Belum ada, Rumah dinas berupa rumah kontrak	197.000 watt <b>- kantor :</b> 33.000 watt <b>- Laboratorium:</b> 164.000 watt	<b>- Saluran telepon</b> (ruang pimpinan, ULPK, dan Tata Usaha) <b>- Internet Jaringan Speedy dan E-mail kantor</b> <b>- Tiap ruangan terhubung dengan telepon extension sebanyak 31 unit</b> <b>- ConferenceVideo</b> <b>- Lan sever internal</b>

**Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana Balai POM di Pangkalpinang**

Pada Tahun 2017, Balai POM di Pangkalpinang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 47 ( Empat Puluh Tujuh) orang yang terdiri dari 5 orang Struktural (1 orang Kepala Balai, 3 Orang Kepala Seksi dan 1 orang Kepala Sub Bagian) serta 7 orang staf tata usaha, 13 orang staf pengujian teranokoko, 10 orang staf pengujian pangan dan 12 orang staf Pemdik Serlik pada semester pertama. Kemudian pada semester kedua terjadi mutasi pegawai ke unit kerja lain sebanyak 2 orang sehingga jumlah pegawai Balai POM di Pangkalpinang sebanyak 45 (Empat Puluh Lima) orang. Selain PNS terdapat juga 16 orang PPNPN di Balai POM di Pangkalpinang.



**Gambar 1.2. Penyebaran Pegawai di Balai POM di Pangkalpinang**



**Gambar 1.3. Profil Pegawai Balai POM di Pangkalpinang berdasar Usia dan Golongan**

#### B. Eksternal

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan yang terbentuk berdasarkan UU No.27 Tahun 2000. Berdasarkan kondisi tersebut wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang digambarkan sebagai berikut :

### **1. Data Umum Wilayah Kerja**

#### **a. Luas Wilayah Kerja**

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki luas 81.724,54 km<sup>2</sup>, dimana sebagian besar merupakan wilayah perairan mencapai 79,90%.

#### **b. Jumlah Kabupaten/Kota**

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 6 kabupaten dan 1 kota, yaitu: Kab. Bangka, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Selatan, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur dan kota Pangkalpinang dengan jumlah kecamatan sebanyak 47 dan jumlah desa/kelurahan sebanyak 381.

#### **c. Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja**

Untuk menjangkau wilayah Pulau Bangka perjalanan dapat ditempuh menggunakan transportasi darat dengan waktu 1 – 3 jam. Sedangkan untuk wilayah Pulau Belitung perjalanan dapat ditempuh menggunakan transportasi laut dengan waktu 4 - 5 jam dan transportasi udara.

#### **d. Waktu yang Diperlukan di satu Wilayah Kerja**

Waktu yang diperlukan petugas Balai POM Pangkalpinang di satu wilayah kerja berkisar antara 2 - 4 hari.

Jumlah sarana yang menjadi target pengawasan Balai POM di Pangkalpinang sebanyak 618 sarana distribusi dan 52 sarana produksi dan jumlah sampel yang disampling dan diuji sebanyak 1000 sampel. Walaupun target yang telah ditetapkan tercapai namun belum mencakup seluruh sarana distribusi, produksi dan produk beredar di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu, penetapan target dilakukan berdasarkan analisa resiko

### **1.5 ISU STRATEGIS**

Dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung muncul isu-isu strategis yang harus diperhatikan, antara lain :

#### **1. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**

Implementasi JKN dapat membawa dampak terhadap Pengawasan Obat dimana BPOM berperan sebagai salah satu penjamin mutu obat. Dalam hal ini tuntutan terhadap peran Balai POM di Pangkalpinang akan semakin besar antara lain adalah peningkatan *pre-market* melalui sertifikasi PBF serta *post-market* melalui pengawasan obat beredar termasuk Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Oleh karena itu kapasitas dan kapabilitas laboratorium, kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan (penguji, inspektur) serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan beban kerja.

#### **2. Peredaran Produk Ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Berdasarkan data hasil pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Pangkalpinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017, peredaran obat tradisional dan kosmetik ilegal serta mengandung bahan berbahaya semakin tinggi. Misalnya saja ditemukan penggunaan kosmetik mengandung merkuri dan hidrokinon yang cukup tinggi di kalangan masyarakat. Selain itu, penggunaan bahan kimia yang dilarang dalam pangan seperti Rhodamin B dan Boraks masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Hal ini sangat mengkhawatirkan apabila masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terpapar produk ilegal dan mengandung bahan berbahaya tersebut terlebih dengan semakin berkembangnya penjualan produk ilegal tersebut secara online. Untuk itu Balai POM di Pangkalpinang berkomitmen untuk lebih mengoptimalkan pemberantasan produk ilegal dan berbahaya tersebut serta meningkatkan kerjasama lintas sektor sehingga masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat memperoleh produk yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi.

### **3. Tingkat Kesadaran Masyarakat yang masih rendah terhadap obat dan makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu**

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu menjadi hal yang perlu mendapat perhatian bagi Balai POM di Pangkalpinang. Data hasil pemeriksaan Balai POM di Pangkalpinang terhadap sarana produksi makanan menunjukkan masih banyak sarana yang belum melakukan proses pengolahan sesuai dengan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran para pelaku usaha dalam penerapan CPPOB tersebut. Selain itu, rendahnya pengetahuan masyarakat terkait peredaran produk ilegal dan mengandung bahan berbahaya masih menjadi celah bagi oknum-oknum tertentu. Hasil Pengawasan menunjukkan masih banyaknya masyarakat yang menggunakan obat tradisional mengandung bahan kimia obat (BKO) serta kosmetik tanpa izin edar (TIE) dikarenakan ketidakpahaman masyarakat. Contohnya seperti ketidaktahuan masyarakat dalam melakukan pengecekan izin edar kosmetik pada kemasan dan website BPOM untuk memastikan bahwa produk tersebut terdaftar di Badan POM. Untuk itu Balai POM di Pangkalpinang berkomitmen untuk lebih meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha serta masyarakat. misalnya dengan melakukan penyebaran informasi yang lebih komunikatif dan intensif.

### **4. Penyalahgunaan Obat-obat tertentu (OOT) dan obat yang mengandung Dekstrometorphan**

Penyalahgunaan obat-obat tertentu seperti Tramadol dan Obat yang mengandung Dekstrometorphan (Komix) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin marak. Hal tersebut menjadi perhatian khusus Balai POM di Pangkalpinang. Berdasarkan data yang ada, ditemukan beberapa kasus terkait penyalahgunaan tersebut di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Belitung Timur.

Penyalahgunaan obat tersebut sering dilakukan oleh penambang timah untuk meningkatkan stamina dan para remaja yang mencampur obat-obatan tersebut dengan minuman berenergi dengan pemakaian yang berlebih. Hal ini dapat terjadi karena ketidaktahuan masyarakat dan efek lingkungan sekitar sehingga dapat menimbulkan bahaya. Berdasarkan hal tersebut untuk memberikan pengetahuan terkait bahaya penyalahgunaan obat tersebut, Balai POM di Pangkalpinang telah melakukan penyebaran informasi ke beberapa Kabupaten/kota yang meliputi Kota Pangkalpinang, Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Upaya penyebaran informasi tersebut akan terus ditingkatkan sehingga kasus penyalahgunaan obat tersebut semakin menurun dan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin terhindar dari bahaya yang dapat terjadi.

## **5. Jejaring Kerja**

Balai POM di Pangkalpinang dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi *single player*. Untuk itu Balai POM di Pangkalpinang mengembangkan kerjasama dengan lintas sektor terkait dan *stake holder* di daerah. Beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki Balai POM di Pangkalpinang yaitu Jejaring Keamanan Pangan Daerah, Gerakan Keamanan Pangan di Desa dan Satgas Pemberantas Obat dan Makanan Ilegal antara lain: STORM, OPSON, OPGABNAS, OPGABDA, Pangea, dan Aksi Penertiban Pasar Dalam Negeri dari OT dan Kosmetik yang TMS. Jejaring kerjasama ini perlu dilaksanakan secara kontinyu agar masyarakat terlindungi dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

## **BAB 2. PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 RENCANA STRATEGIS**

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja pengawasan obat dan makanan, maka disusun Rencana Strategis lima tahun Balai POM di Pangkalpinang 2015-2019.

Penyusunan Renstra Balai POM di Pangkalpinang telah mengacu pada Renstra Badan POM RI tahun 2015 – 2019 yaitu terkait dengan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai/Balai Besar POM. Renstra Balai POM di Pangkalpinang ditetapkan berdasar SK Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor HK.04.880.05.15.0609 tanggal 11 Mei 2015. Secara ringkas, substansi Renstra Balai POM di Pangkalpinang adalah sebagai berikut

#### **I. Visi**

**Obat dan Makanan Aman  
Meningkatkan Kesehatan Masyarakat  
dan Daya Saing Bangsa**

#### **II. Misi**

- 1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat**
- 2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan**
- 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM**

### III. Budaya Organisasi

1. Profesional  
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. Integritas  
Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan
3. Kredibilitas  
Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. Kerjasama Tim  
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik
5. Inovatif  
Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.
6. Responsif / Cepat Tanggap  
Antisipatif dan responsive dalam mengatasi masalah

Visi, Misi,  
Budaya  
Organisasi

### IV. TUJUAN

1. **Meningkatnya jaminan Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat**
2. **Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan Global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi**

### **Sasaran Strategis**

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Pangkalpinang dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Pangkalpinang. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan diharapkan Balai POM di Pangkalpinang akan dapat mencapai sasaran strategis serta mengacu pada Renstra Badan POM 2015 – 2019 maka Sasaran Strategis, indikator kinerja dan target dari Balai POM di Pangkalpinang selama lima tahun (2015-2019) telah ditetapkan seperti terlampir pada Lampiran 1.

## **2.2 PERJANJIAN KINERJA 2017**

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 disebut sebagai Perjanjian Kinerja

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud komitmen dari penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Dalam Perjanjian Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang tahun 2017, untuk Program Pengawas Obat dan Makanan terdapat 3 sasaran strategis dengan 8 indikator utama dan untuk Program/Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Pangkalpinang terdapat 3 sasaran dengan 9 indikator kinerja.

**Program Pengawas Obat dan Makanan**

Sasaran strategis dan indikator kinerja Program Pengawas Obat dan Makanan dapat dijabarkan sebagai berikut :

**SS 1 : Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan**

Indikator Kinerja Utama yang digunakan untuk sasaran kinerja tersebut adalah seperti tercantum pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1. Indikator Kinerja Sasaran 1.**

	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,00 %
2.	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	72,00 %
3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	89,00 %
4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81,00 %
5.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	85,50 %

Indikator 1-5 merupakan indikator utama pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017, untuk itu digunakan **target kumulatif** pada periode Renstra 2015-2019 dengan menggunakan data 2012-2014 dan perolehan nasional sebagai *baseline* .

Persentase ini diperoleh dari jumlah hasil uji memenuhi syarat (MS) dari total sampel yang diuji pada tahun berjalan dibagi jumlah seluruh sampel yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan.

Kegiatan yang menunjang dan indikator kinerjanya untuk Sasaran strategis tersebut dapat dijabarkan seperti tercantum pada tabel 2.2

**Tabel 2.2. Indikator Kinerja Kegiatan yang Menunjang Sasaran 1.**

<b>INDIKATOR KINERJA</b>		<b>TARGET</b>
1.	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	1000
2.	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100,00 %
3.	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100,00 %
4.	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	34,70 %
5.	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	5

Jumlah sampel yang diuji dengan parameter kritis diambil dari jumlah sampel yang selesai diuji dengan parameter kritis yang ditetapkan oleh Badan POM.

Pemenuhan Target sampling diperoleh dari jumlah sampel yang diambil pada IFK dan gudang alokon KB dari target sampel yang harus disampling di IFK dan gudang alokon KB di masing-masing Balai.

Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan dihitung dari jumlah sarana produksi yang diperiksa dari Jumlah sarana produksi yang ada di wilayah tersebut.

Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan dihitung dari jumlah sarana produksi yang diperiksa dari Jumlah sarana distribusi yang ada di wilayah tersebut.

Jumlah Perkara di bidang obat dan Makanan adalah jumlah kasus yang dilanjutkan ke po-justisia yang ditangani dan telah diterbitkan SPDP.

**SS 2 : Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan**

Indikator yang digunakan untuk sasaran kinerja tersebut adalah seperti tercantum pada tabel 2.3.

**Tabel 2.3. Indikator Kinerja Sasaran 2.**

INDIKATOR KINERJA		TARGET
6	Tingkat Kepuasan Masyarakat	82 %
7	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	5

Tingkat Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 16 tahun 2014).

Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan.

Kegiatan yang menunjang beserta indikator kegiatan yang digunakan untuk sasaran kinerja tersebut adalah seperti tercantum pada tabel 2.4.

**Tabel 2.4. Indikator Kinerja Kegiatan yang Menunjang Sasaran 2**

INDIKATOR KINERJA		TARGET
6	Jumlah Layanan Publik Balai POM	170
7	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	17

**SS 3 : Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM**

Indikator yang digunakan untuk sasaran kinerja tersebut adalah seperti tercantum pada tabel 2.5.

**Tabel 2.5. Indikator Kinerja Sasaran 3.**

INDIKATOR KINERJA		TARGET
8	Nilai SAKIP Balai POM di Pangkalpinang dari Badan POM	B

Nilai SAKIP diukur berdasarkan hasil penilaian SAKIP yang dilakukan oleh APIP Badan POM.

Kegiatan yang menunjang dan indikatornya yang digunakan untuk sasaran kinerja tersebut adalah seperti tercantum pada tabel 2.6.

**Tabel 2.6. Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM Program Pengawas Obat dan Makanan.**

INDIKATOR KINERJA		TARGET
8	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	78,00 %
9	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10

Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar diperoleh dari rata-rata persentase sarana dan prasarana yang diadakan dan persentase pemenuhan alat laboratorium yang dimiliki.

Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu adalah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dihasilkan dan harus dilaporkan Balai, meliputi dokumen; Review Renstra 2015-2019, Perjanjian Kinerja tahun 2017, RKAKL/DIPA tahun 2018, Laporan Kinerja tahun 2016, Laporan triwulanan I 2017, Laporan triwulanan II 2017, Laporan triwulanan III 2017, Laporan Tahunan tahun 2016, Laporan keuangan tahun 2016 dan Laporan Keuangan Semester 1 tahun 2017.

### 2.3 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Pada Penetapan Kinerja Balai POM di Pangkalpinang tahun 2016 terdapat 3 sasaran strategis dengan 8 indikator kinerja yang dijabarkan dalam 9 komponen kegiatan yang berkontribusi pada pencapaian indikator sasaran.

Untuk dapat mengukur kinerja, baik kinerja sasaran maupun kinerja kegiatan digunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan. Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus No. 1 sbb :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin **tinggi** realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah**, maka digunakan rumus No. 2 sbb :

$$\% \text{ capaian} = \frac{(100 - \text{realisasi})}{(100 - \text{target})} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam pencapaian indikator pada LAKIP ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.7. Kriteria Pengukuran Pencapaian Indikator.**

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	$100\% < \chi \leq 125\%$
Baik	100%
Cukup	$75\% \leq \chi < 100\%$
Kurang	$\chi < 75\%$
Tidak dapat disimpulkan	$\chi > 125\%$

## BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada

setiap akhir periode suatu instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Dalam pelaporan ini akan dibandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja beserta analisisnya sesuai Penetapan Kinerja Balai POM di Pangkalpinang Tahun 2017.

### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada Penetapan Kinerja Balai POM di Pangkalpinang tahun 2017 terdapat 3 sasaran strategis dengan 8 indikator kinerja yang dijabarkan dalam 9 komponen kegiatan yang berkontribusi pada pencapaian indikator sasaran. Capaian sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 3.1

**Tabel 3.1 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja TA 2017  
Balai POM di Pangkalpinang**

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	93,00	98,12	105,51	Memuaskan
		2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	72,00	86,30	119,86	Memuaskan
		3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	89,00	97,35	109,38	Memuaskan
		4. Persentase Suplemen	81,00	76,47	94,41	Cukup

		Kesehatan yang memenuhi syarat				
		5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	85,50	98,50	115,2	Memuaskan
2	<b>Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan Dengan Pemangku kepentingan, Partisipasi Masyarakat</b>	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	82,00	82,04	100,05	Memuaskan
		2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	5	5	100	Memuaskan
3	<b>Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM</b>	Nilai SAKIP dari BPOM	B (65)	BB (72,99)		Memuaskan

Terhadap capaian ketiga sasaran strategis tersebut, Balai POM di Pangkalpinang melakukan beberapa analisis dan evaluasi. Analisis capaian kinerja tersebut tertuang pada bagian berikut ini.

## ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

### SS 1 : Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan terdiri dari 5 indikator yang dijadikan sebagai indikator kinerja utama (IKU). Secara umum sasaran pertama tersebut dicapai melalui kegiatan sampling atau pengambilan contoh oleh Seksi Pendidik Serlik dan pengujian sampel obat dan makanan oleh Seksi Pengujian Balai POM di Pangkalpinang.

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1 Tahun 2017**

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	93,00	98,12	105,51	Memuaskan
		2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	72,00	86,30	119,86	Memuaskan
		3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	89,00	97,35	109,38	Memuaskan
		4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81,00	76,47	94,41	Cukup
		5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	85,50	98,50	115,2	Memuaskan

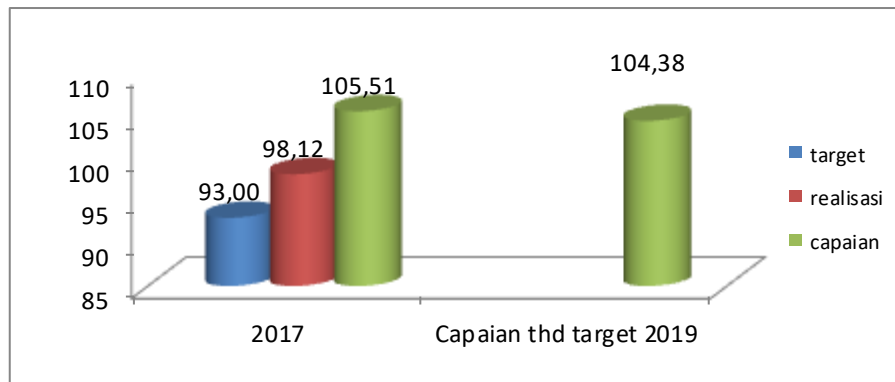
Pencapaian sasaran tersebut di atas diukur dengan 5 (lima) indikator sebagai berikut :

**1. Persentase Obat yang memenuhi syarat**

a. Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat

Dari hasil pengujian komoditi obat diperoleh obat yang memenuhi syarat sebesar 98,12 % atau 209 sampel obat yang memenuhi syarat dari total 213 sampel obat yang diuji dengan menggunakan parameter kritis. Sampel obat termasuk sampel obat KB.

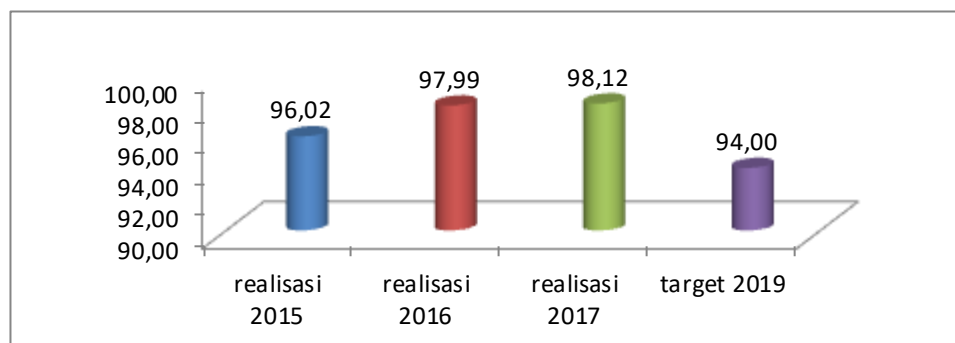
b. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat adalah 98,12 % dari target yang ditetapkan sebesar 93,00 % atau capaian yang diperoleh adalah 105,51 %. Capaian tersebut termasuk kategori memuaskan. Apabila kita membandingkan terhadap target akhir tahun Renstra 2019, maka capaian kinerja sasaran ini telah melampaui target yang ditetapkan (94,00%), capaiannya sudah mencapai 104,38 %



**Gambar 3.1. Grafik Perbandingan Capaian Obat yang MS Tahun 2017 dan Capaian terhadap Target 2019**

c. Perbandingan realisasi kinerja 2017 dengan tahun 2015 dan 2016.

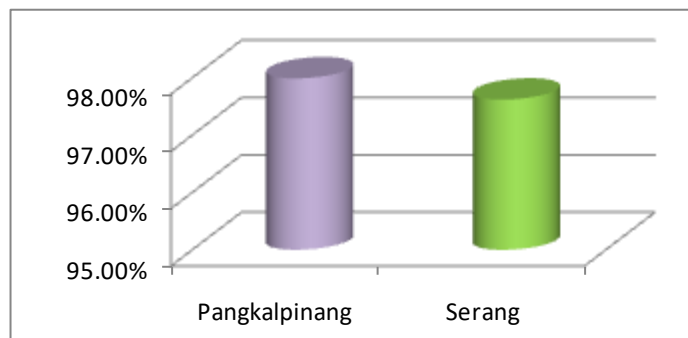
Apabila dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016 diperoleh obat yang memenuhi syarat berturut-turut adalah 96,02% dan 97,99%. Realisasi kinerja pada tahun 2017 sebesar 98,12%. Bila dibandingkan dengan Tahun 2015 dan 2016 tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Namun, realisasi kinerja dari tahun 2014 sampai dengan 2017 sudah melebihi target akhir tahun renstra 2019 (94,00 %) sehingga diperlukan reviu terhadap Renstra terkait target dan definisi operasional dari indikator sasaran strategis ini atau dilakukan penyesuaian targetnya.



**Gambar 3.2. Grafik Perbandingan Realisasi Obat yang MS 2017 dengan Realisasi Tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 beserta Target 2019**

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan Balai POM di Serang

Realisasi kinerja Balai POM di Pangkalpinang dengan indikator persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 98,12 %, bila dibandingkan dengan realisasi Balai POM di Serang dengan indikator kinerja yang sama yaitu 95,63 %, maka perolehan presentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang tidak jauh berbeda dengan Balai POM di Serang.



**Gambar 3.3. Grafik Perbandingan Realisasi Obat yang MS 2017 Balai POM di Pangkalpinang dan Balai POM di Serang**

**Pencapaian indikator kinerja ini didukung dengan kegiatan-kegiatan :**

1. Pengawasan Sarana Distribusi Obat yang lebih intensif
2. Penegakkan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran di bidang obat
3. Pembinaan kepada pelaku usaha
4. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi obat.
5. Pencanaan Aksi Penyalahgunaan Obat dan Pemberantasan Obat Ilegal
6. Intensifikasi pengawasan peredaran obat illegal.

**Dalam mempertahankan capaian kinerja ini perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan atau rencana tindak lanjut antara lain :**

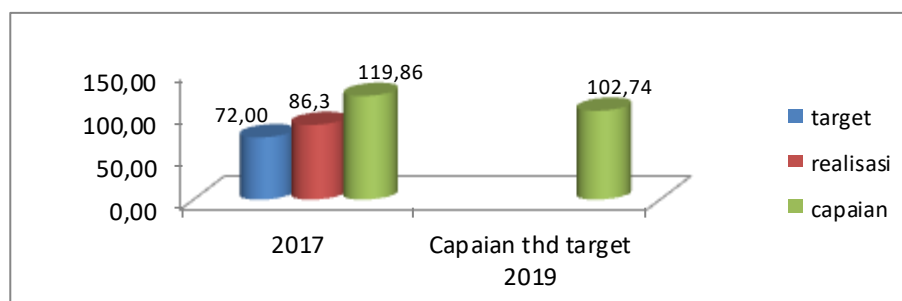
1. Intensifikasi terhadap pengawasan obat recall dan diduga palsu.
2. Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap pemahaman CDOB untuk sarana distribusi obat baik yang diadakan oleh Badan POM sendiri maupun bekerjasama dengan stakeholder.
3. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pengawasan sarana distribusi obat.
4. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat.

## **2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat**

### **a. Realisasi Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat**

Dari hasil pengujian komoditi obat tradisional diperoleh obat tradisional yang memenuhi syarat sebesar 86,30 % atau 126 sampel obat tradisional yang memenuhi syarat dari total 146 sampel obat tradisional yang diuji dengan menggunakan parameter kritis.

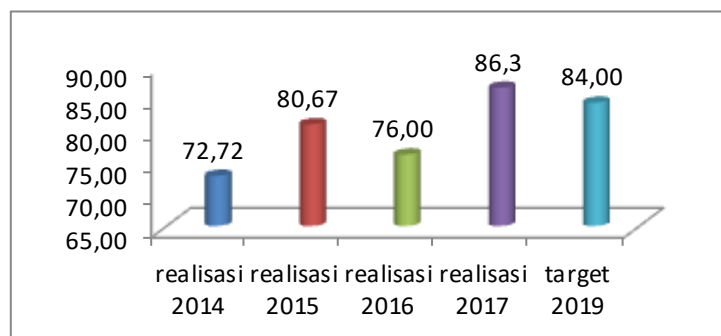
- b. Realisasi Persentase Obat tradisional yang Memenuhi Syarat adalah 86,30% dari target yang ditetapkan sebesar 72,00 % atau capaian yang diperoleh adalah 119,86 %. Capaian tersebut termasuk kategori **memuaskan**. Apabila kita membandingkan terhadap target akhir tahun Review Renstra 2019, maka capaian kinerja sasaran ini telah melampaui target yang ditetapkan (84,00%), capaiannya sudah mencapai 102,74 %



**Gambar 3.4. Grafik Perbandingan Capaian Obat Tradisional yang MS Tahun 2017 dan Capaian terhadap Target 2019**

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja 2017 dengan tahun 2014 dan 2015 dan 2016

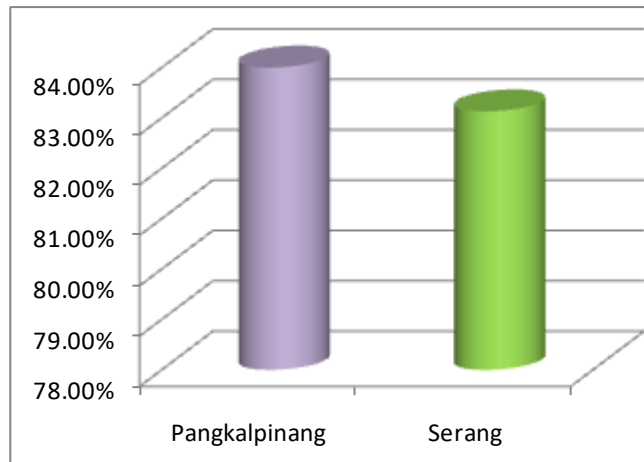
Apabila dibandingkan dengan tahun 2014, 2015 dan 2016 diperoleh obat tradisional yang memenuhi syarat berturut-turut adalah 72,72 % , 80,67 % , 76,00%. Realisasi kinerja pada tahun 2017 sebesar 86,30% bila dibandingkan dengan Tahun 2016 terjadi peningkatan persentase obat tradisional yang memenuhi syarat (MS) yang beredar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga diperlukan analisis lebih lanjut terkait hal tersebut. Realisasi kinerja 2016 sudah melebihi target akhir tahun renstra 2019 (74,00 %) sehingga dilakukan reviu Renstra terkait target menjadi 84,00 %.



**Gambar 3.5. Grafik Perbandingan Realisasi Obat Tradisional yang MS 2017 dengan Realisasi Tahun 2014 ,2015, 2016 dan 2017 beserta Target 2019**

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan Balai POM di Serang

Realisasi kinerja Balai POM di Pangkalpinang dengan indikator persentase obat tradisional yang memenuhi syarat sebesar 86,84 %, bila dibandingkan dengan realisasi Balai POM di Serang dengan indikator kinerja yang sama yaitu 83,13 %,



**Gambar 3.6. Grafik Perbandingan Realisasi Obat Tradisional yang MS 2017 Balai POM di Pangkalpinang dan Balai POM di Serang**

**Terjadinya peningkatan persentase obat tradisional yang memenuhi syarat (MS) terhadap Tahun 2017 dapat disebabkan oleh:**

1. Pengawasan terhadap produk obat tradisional yang beredar lebih intensif, (melalui kegiatan aksi penertiban pasar dalam negeri, operasi gabungan daerah dan nasional).
2. Perencanaan sampling yang lebih tajam dan tepat sasaran.
3. Pembinaan dan penyebaran Informasi terkait dengan obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan kepada pelaku usaha Obat Tradisional.

**Dalam meningkatkan capaian kinerja ini perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan atau rencana tindak lanjut antara lain :**

1. Intensifikasi terhadap pengawasan obat tradisional Public Warning (PW)
2. Peningkatan pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana distribusi obat tradisional dan masyarakat terkait obat tradisional yang memenuhi ketentuan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait pelaksanaan pengawasan sarana distribusi obat tradisional.

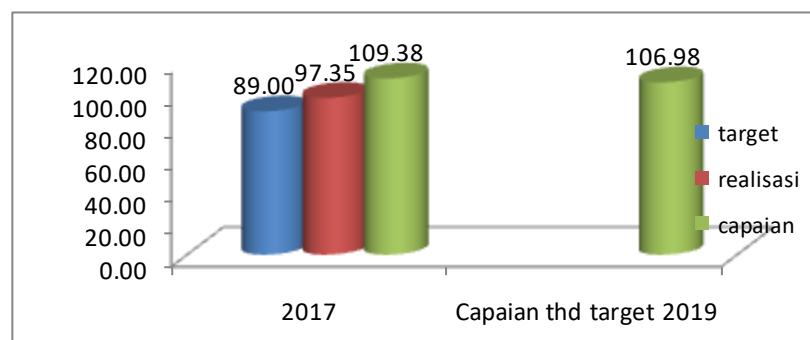
4. Penerapan sanksi baik administrasi maupun pro justicia terhadap sarana distribusi obat tradisional yang mengedarkan obat tradisional Tanpa Izin Edar (TIE) atau mengandung bahan kimia obat.

### 3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat

#### a. Realisasi Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat

Dari hasil pengujian komoditi kosmetik diperoleh kosmetik yang memenuhi syarat sebesar 97,35 % atau 294 sampel kosmetik yang memenuhi syarat dari total 302 sampel kosmetik yang diuji dengan menggunakan parameter kritis.

b. Realisasi Persentase kosmetik yang Memenuhi Syarat adalah 97,35 % dari target yang ditetapkan sebesar 89,00 % atau capaian yang diperoleh adalah 109,38 %. Capaian tersebut termasuk kategori **memuaskan**. Apabila kita membandingkan terhadap target akhir tahun Review Renstra 2019, maka capaian kinerja sasaran ini telah melampaui target yang ditetapkan (91,00%), dengan capaian 106,98 %.

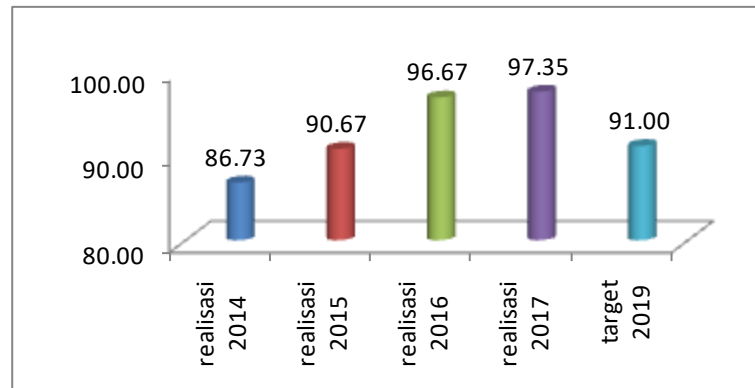


Gambar 3.7. Grafik Perbandingan Capaian Kosmetik yang MS Tahun 2017 dan Capaian terhadap Target 2019

#### c. Perbandingan realisasi kinerja 2017 dengan tahun 2014, 2015 dan 2016

Apabila dibandingkan dengan tahun 2014, 2015 dan 2016 diperoleh kosmetik yang memenuhi syarat berturut-turut adalah 86,73%, 90,67% dan 96,67%. Realisasi kinerja pada tahun 2017 sebesar 97,35% bila

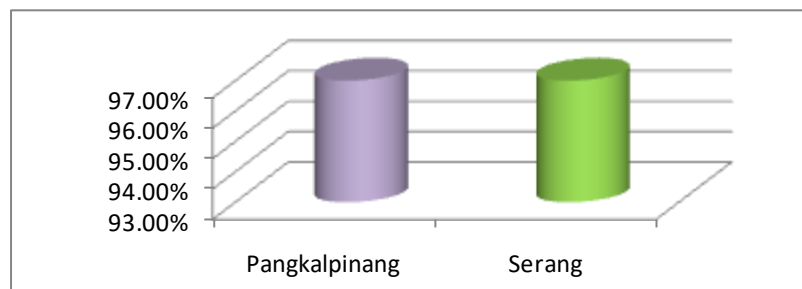
dibandingkan dengan Tahun 2014, 2015 dan 2016 terjadi peningkatan kosmetik yang memenuhi syarat. Namun, realisasi kinerja tahun 2017 sudah melebihi target akhir tahun review Renstra 2019 (93,00 %).



**Gambar 3.8. Grafik Perbandingan Realisasi Kosmetik yang MS 2016 dengan Realisasi Tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 beserta Target 2019**

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan Balai POM di Serang

Realisasi kinerja Balai POM di Pangkalpinang dengan indikator persentase kosmetik yang memenuhi syarat sebesar 97,35 %, bila dibandingkan dengan realisasi Balai POM di Serang dengan indikator kinerja yang sama yaitu 98,43 %, maka perolehan presentase kosmetik yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang tidak jauh berbeda dibandingkan Balai POM di Serang.



**Gambar 3.9. Grafik Perbandingan Realisasi Kosmetik yang MS 2017 Balai POM di Pangkalpinang dan Balai POM di Serang**

**Pencapaian indikator kinerja ini didukung dengan kegiatan-kegiatan :**

1. Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik yang lebih intensif

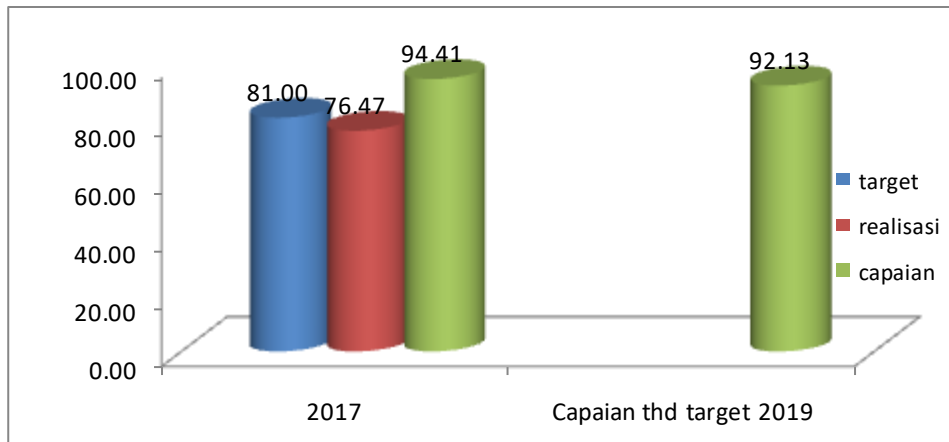
2. Peningkatan pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana distribusi kosmetik dan masyarakat terkait kosmetik yang memenuhi ketentuan.
3. Penegakkan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran di bidang kosmetik.
4. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi kosmetik.

**Dalam mempertahankan capaian kinerja ini perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan atau rencana tindak lanjut antara lain :**

1. Intensifikasi terhadap pengawasan kosmetik public warning (PW)
2. Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap pemahaman untuk sarana distribusi kosmetik baik yang diadakan oleh Badan POM sendiri maupun bekerjasama dengan stakeholder
3. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi kosmetik.

#### **4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat**

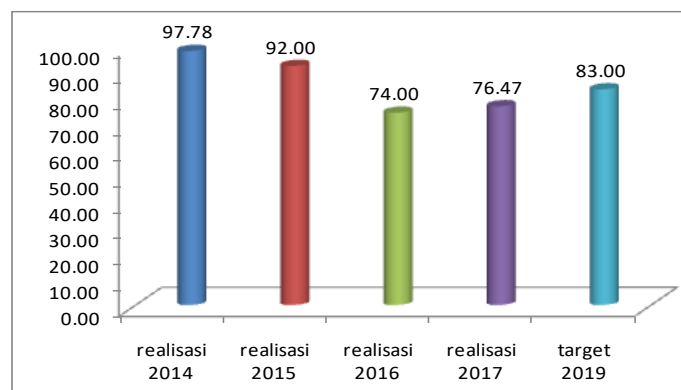
- a. Realisasi Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat  
Dari hasil pengujian komoditi suplemen kesehatan diperoleh suplemen kesehatan yang memenuhi syarat sebesar 76,47 % atau 39 sampel suplemen kesehatan yang memenuhi syarat dari total 51 sampel suplemen kesehatan yang diuji dengan menggunakan parameter kritis.
- b. Realisasi Persentase suplemen kesehatan yang Memenuhi Syarat adalah 76,47 % dari target yang ditetapkan sebesar 81,00 % atau capaian yang diperoleh adalah 94,41 %. Capaian tersebut termasuk kategori cukup. Apabila kita membandingkan terhadap target akhir tahun Renstra 2019, maka capaian kinerja sasaran ini masih jauh dari target yang ditetapkan (83,00 %), dengan capaian 92,13 %.



**Gambar 3.10. Grafik Perbandingan Capaian Suplemen Kesehatan yang MS Tahun 2017 dan Capaian terhadap Target 2019**

c. Perbandingan realisasi kinerja 2017 dengan tahun 2014, 2015 dan 2016.

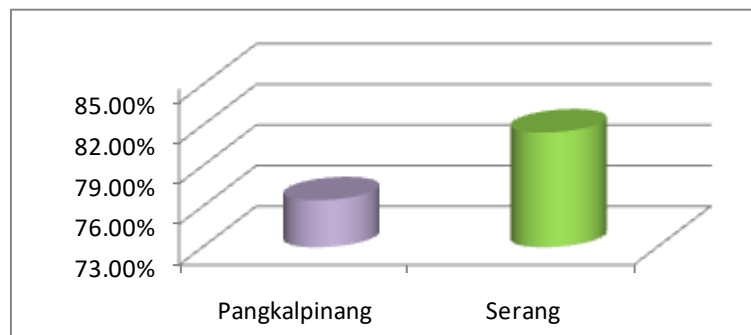
Apabila dibandingkan dengan tahun 2014, 2015 dan 2016 diperoleh suplemen kesehatan yang memenuhi syarat berturut-turut adalah 97,78 % ,92,00%, dan 74,00%. Realisasi kinerja pada tahun 2017 sebesar 76,47% Realisasi kinerja tahun 2017 masih jauh dari target akhir tahun renstra 2019 (83,00 %) .Oleh karena itu, perlu dilakukan review atau penyesuaian target renstra.



**Gambar 3.11. Grafik Perbandingan Realisasi Suplemen Kesehatan yang MS 2017 dengan Realisasi Tahun 2014, 2015, 2016, dan beserta Target 2019**

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan Balai POM di Serang

Realisasi kinerja Balai POM di Pangkalpinang dengan indikator persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat sebesar 76,47 %, bila dibandingkan dengan realisasi Balai POM di Serang dengan indikator kinerja yang sama yaitu 81,48 %, maka perolehan presentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang lebih rendah dibandingkan Balai POM di Serang. Hal ini dapat disebabkan karena adanya perbedaan parameter uji diluar parameter uji kritis yang dilakukan pengujian oleh Balai POM di Pangkalpinang dalam pemenuhan Standar Ruang Lingkup, seperti Penetapan Kadar Pengawet dan Penetapan Kadar Pemanis buatan, yang sebagian besar dari hasil uji adalah Tidak Memenuhi Syarat.



Gambar 3.12. Grafik Perbandingan Realisasi Suplemen Kesehatan yang MS 2017 Balai POM di Pangkalpinang dan Balai POM di Serang

**Dalam meningkatkan capaian kinerja ini perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan atau rencana tindak lanjut antara lain :**

1. Intensifikasi terhadap pengawasan suplemen kesehatan Public Warning (PW)
2. Peningkatan pembinaan dan penyebaran informasi terkait suplemen kesehatan yang memenuhi ketentuan.

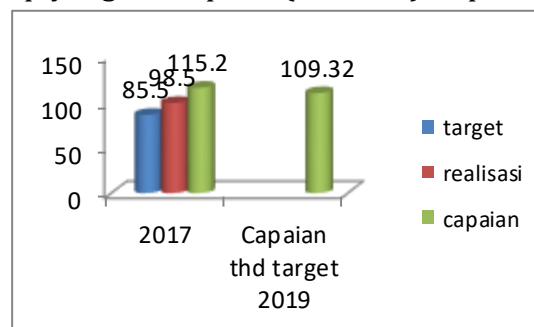
3. Penerapan sanksi baik administrasi maupun pro justicia terhadap sarana distribusi yang mengedarkan suplemen kesehatan Tanpa Izin Edar (TIE)/ Public Warning (PW).

**5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat**

a. Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Dari hasil pengujian komoditi makanan diperoleh makanan yang memenuhi syarat sebesar 98,5% atau 197 sampel makanan yang memenuhi syarat dari total 200 sampel makanan yang diuji. Dari 300 sampel makanan yang diuji, terdapat 91% sampel yang diuji menggunakan parameter uji kritis sesuai dengan Juknis Pedoman Sampling TA 2017. Terdapat 9% sampel makanan yang belum terpenuhi parameter uji kritis seperti : Penetapan Kadar Nitrit dan Nitrat, Penetapan Kadar Mangan (Mn), Penetapan Kadar Asam folat dikarenakan belum tersedia reagensia dan baku pembanding. Selain adanya 9% sampel makanan yang belum dilakukan uji parameter kritis ada 71 sampel makanan yang tidak memiliki Nomor Izin Edar seperti kemasan pangan, PJJAS, Tahu, Mie Basah, Cake, Terasi, Amiu, Gula Kristal putih, Kerupuk ikan/udang, dan Es Krim

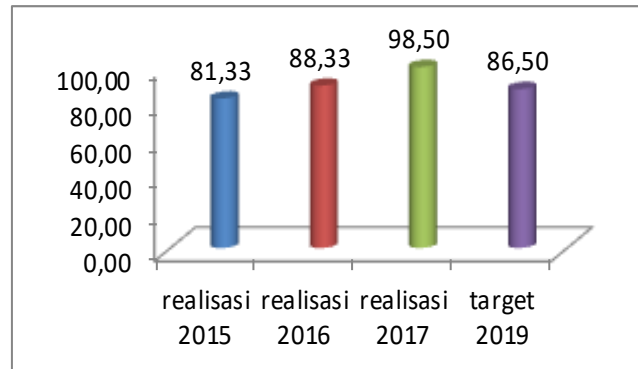
b. Realisasi Persentase makanan yang Memenuhi Syarat adalah 98,5 % dari ditetapkan sebesar 85,50 % atau capaian yang diperoleh adalah 115,2 %. Capaian tersebut termasuk kategori memuaskan. Apabila kita membandingkan terhadap target akhir tahun Review Renstra 2019, maka capaian kinerja sasaran terhadap yang ditetapkan (90,10 %), capaiannya sudah mencapai 109,32%



**Gambar 3.13. Grafik Perbandingan Capaian Makanan yang MS Tahun 2017 dan Capaian terhadap Target 2019**

c. Perbandingan realisasi kinerja 2017 dengan tahun 2015 dan 2016.

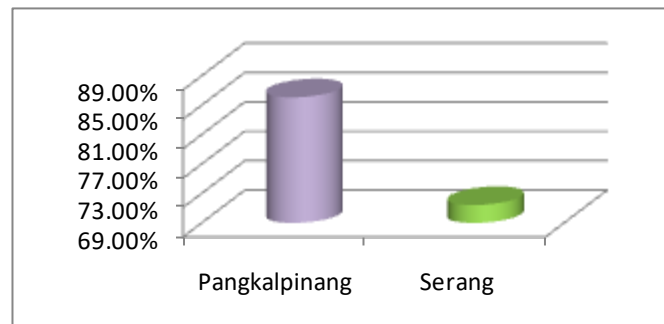
Apabila dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016 diperoleh makanan yang memenuhi syarat berturut-turut adalah 81,33% dan 88,33%. Realisasi kinerja pada tahun 2017 adalah sebesar 98,5% Realisasi kinerja tahun 2017 sudah melebihi target akhir tahun renstra 2019 (86,50 %),



**Gambar 3.14. Grafik Perbandingan Realisasi Makanan yang MS 2017 dengan Realisasi Tahun 2015 dan 2016 beserta Target Akhir Tahun Renstra 2019**

d. Perbandingan realisasi kinerja dengan Balai POM di Serang

Realisasi kinerja Balai POM di Pangkalpinang dengan indikator persentase makanan yang memenuhi syarat sebesar 86,08 %, bila dibandingkan dengan realisasi Balai POM di Serang dengan indikator kinerja yang sama yaitu 71,43%, maka perolehan presentase makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang lebih tinggi dibandingkan Balai POM di Serang. Hal ini dapat disebabkan karena lebih banyaknya penyalahgunaan bahan berbahaya dalam makanan di Propinsi Banten dikarenakan jumlah penduduk Propinsi Banten yang lebih banyak dan juga faktor geografis yang dekat dengan ibukota negara yaitu propinsi DKI Jakarta.



**Gambar 3.15. Grafik Perbandingan Realisasi Makanan yang MS 2017 Balai POM di Pangkalpinang dan Balai POM di Serang**

**Pencapaian indikator kinerja ini didukung dengan kegiatan-kegiatan :**

1. Pengawasan Sarana Produksi yang lebih intensif dalam penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
2. Peningkatan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)
3. Peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk pangan mengenai Pangan yang memenuhi ketentuan (misalnya kegiatan intensifikasi pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Natal, Tahun Baru).

**Dalam mempertahankan capaian kinerja ini perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan atau rencana tindak lanjut antara lain :**

1. Intensifikasi terhadap pengawasan pangan Tanpa Izin Edar (TIE)
2. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait pelaksanaan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pengawasan sarana distribusi pangan.
4. Meningkatkan koordinasi dan kapasitas lintas sektor dalam memberikan pembinaan kepada UMKM.
5. Meningkatkan kualitas pembinaan dan penyebaran informasi terhadap pelaku usaha dan masyarakat terhadap makanan bermutu dan aman sehingga persentase makanan yang memenuhi syarat lebih meningkat.

**Tabel 3.3. Hasil Pengujian Sampel Balai POM di Pangkalpinang tahun 2017**

Komoditi	Target Sampel DIPA	Realisasi Sampling	Sampel Selesai uji	Hasil Pengujian			Uraian TMS
				MS	TMS		
					Mutu	Label	
OBAT	220	220	220	215	5	0	PH, Volume Terpindahkan, Kadar, Disolusi, Kadar Nikotin Rokok
OT	150	152	152	132	20	-	1 Pengawet, 5 Kadar air, Kadar, 2 Kadar air dan ALT, 9 ALT, 2 ALT dan AKK, 1 Volume Terpindahkan
Suplemen Makanan	50	51	51	39	12	0	1 Penetapan Kadar, B2 dan Kafein, 4 Penetapan Kadar Kafein, 1 PK metal Paraben dan Total Pengawet Propil Paraben, 1 Kadar Air, 1 B1 dan B2, 1 Vit B2 dan Vit C, 2 Aspartam, 1 Vit B2 1
Kosmetik	300	304	304	296	8	0	7 TMS PH, 1 TMS Raksa
PANGAN	300	300	300	262	38		Siklamat (4), bobot tuntas (1), Enzim diastase (1), Enzim diastase dan kadar air (2), Formaldehid (1), pH (3), Zn (2), Pb (2), Pb dan ALT (1), Bensoat (1), Kafein (1), ALT (13), AKK (1), ALT dan AKK (3), E.coli (1), Enterobacter (1)
<b>TOTAL</b>	<b>1020</b>	<b>1027</b>	<b>1027</b>	<b>944</b>	<b>83</b>		

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Sasaran pertama ini didukung oleh beberapa kegiatan seperti tertera pada Tabel 3.4

**Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan**

Sasaran Kegiatan	Indikator		Target	Realisasi	% Capaian
Uraian	Uraian				
Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	1000 sampel	996 sampel	99,60 %
	2	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100%	94,44%	94,44%
Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	3	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100%	103,85 %	103,85 %
Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standard	4	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	34,70 %	35,63%	102,69 %
Meningkatnya hasil tindaklanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	5	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	5	3	60%

- ❖ Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar

Indikator :

1. Jumlah Sampel Yang diuji menggunakan Parameter Kritis

Dari realisasi sampling yang dilakukan oleh Balai POM di Pangkalpinang sejumlah 1027 sampel. Dari Realisasi sampling tersebut terdapat 31 sampel yang tidak dapat dilakukan pengujian Parameter Uji Kritis yang terdiri dari 2 sampel Obat, 2 sampel Kosmetik, dan 27 sampel Pangan sehingga realisasi jumlah sampel obat dan makanan yang diuji menggunakan parameter kritis adalah 996 sampel dengan capaian 99,60 % (Memuaskan). Selain dilakukan pengujian di laboratorium Balai POM di Pangkalpinang, beberapa sampel dengan parameter uji tertentu dilakukan uji rujuk ke Laboratorium unggulan sesuai dengan Pedoman Sampling Obat dan Makanan Tahun 2017 seperti rokok, DNA porcaine dan uji sterilitas.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2016 diperoleh Sampel yang diuji dengan Parameter Kritis berturut-turut adalah 999 Realisasi kinerja pada tahun 2017 sebanyak 996 sedangkan Capaian indikator kegiatan ini terhadap target tahun 2019 adalah sebesar 99,60 %.

Pencapaian indikator kegiatan ini didukung beberapa kegiatan seperti :

- a. Kepatuhan terhadap Pedoman Sampling Obat dan Makanan
- b. Perencanaan sampling yang lebih matang.
- c. Peningkatan kemampuan uji laboratorium.
- d. Peningkatan pemenuhan standar minimal alat laboratorium
- e. Sarana prasarana yang lebih memadai baik dalam melakukan sampling dan pengujian.

2. Pemenuhan target sampling Produk Obat di sektor Publik (Instalasi Farmasi Kabupaten)

Jumlah Pemenuhan Target Sampling Produk Obat di sektor publik (Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota) yang diuji menggunakan parameter kritis sudah termasuk kategori memuaskan, dengan capaian 94,44 % (17 sampel dari target 18 sampel). Apabila dibandingkan dengan Capaian tahun 2016 maka pemenuhan target sampling Produk Obat di sektor Publik (Instalasi Farmasi Kabupaten) dan 102,63 %

Capaian indikator kegiatan ini terhadap target tahun 2019 adalah sebesar 94,44 %.

❖ Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kualitas sarana produksi yang memenuhi standar.

Indikator : Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan

Kegiatan Pengawasan sarana produksi dilaksanakan di seluruh wilayah provinsi Kep. Bangka Belitung. Pada tahun 2017 jumlah sarana produksi yang diperiksa ditargetkan sebanyak 52 sarana dan terealisasi sebanyak 54 sarana sehingga capaiannya sebesar 103,85 % dengan kategori Memuaskan.

Jumlah sarana produksi berdasarkan database pada awal tahun 2017 adalah 16 sarana produksi, namun pada saat dilakukan pemeriksaan sarana produksi, ditemukan 1 sarana produksi pangan (MD) yang sudah tidak beroperasi lagi. Sarana produksi yang diperiksa antara lain Industri makanan (MD) sebanyak 15 sarana (meliputi sarana AMDK, Sarana produksi Tepung Tapioka, Minuman Alkohol dan Pengepakan garam) dan IRTP sebanyak 39 sarana. Apabila dibandingkan dengan tahun 2016 diperoleh 105,88% dengan Realisasi kinerja pada tahun 2017 sebesar 103,85%. maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan dikarenakan tidak adanya penambahan Sarana Produksi di Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi Balai POM di Serang dengan indikator yang sama yaitu sebesar 36,60%. Adanya perbedaan yang signifikan antara keduanya hal ini diakibatkan jumlah atau cakupan sarana produksi di Balai POM di Serang yang luas, dilihat dari total jumlah sarana produksi yang ada di wilayah tersebut sebanyak 500 sarana dibandingkan jumlah sarana produksi di wilayah Bangka Belitung hanya 52 sarana

Capaian sarana yang diperiksa terhadap target tahun 2019 adalah sebesar 103,85 %. Realisasi tahun 2017 hampir sama dengan capaian Tahun 2016 (100,88 %) dan seluruh sarana yang memiliki izin MD telah diperiksa.

Hal – hal yang mendukung pencapaian indikator kegiatan diatas adalah :

- a. Perencanaan pengawasan sarana produksi obat dan makanan yang lebih baik.
- b. Meningkatnya kompetensi dan skill dari petugas dalam melakukan pengawasan sarana produksi obat dan makanan.

❖ Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standard

Indikator : Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan

Realisasi persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan tahun 2017 adalah sebesar 35,63 %. Jumlah sarana distribusi yang dilakukan pengawasan sebanyak 630 sarana distribusi dari total 1.768 sarana distribusi di wilayah propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Capaian indikator kegiatan tersebut adalah 102,68 % termasuk kategori Memuaskan. Capaian tersebut jika dibandingkan terhadap target pada tahun 2019 adalah sebesar 100,74 %. Perbandingan realisasi terhadap realisasi tahun 2016 (97,88 %) mengalami kenaikan sebesar 2,86 %. bila dibandingkan dengan realisasi Balai POM di Serang dengan indikator kinerja yang sama yaitu 43,84 %,

Pencapaian indikator ini didukung kegiatan seperti :

- a. Pengawasan sarana distribusi produk obat dan makanan termasuk NAPZA dan Bahan berbahaya
- b. Rencana Aksi penertiban pasar dalam negeri dari kosmetik TMS

❖ Sasaran Kegiatan : Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan

Indikator : Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan

Pada tahun 2017, Balai POM di Pangkalpinang menangani 3 perkara sampai dengan tahap SPDP dari target 5 perkara sehingga capaian kegiatan ini adalah sebesar 60%. Perkara yang ditangani terdiri dari 1 perkara lama yang di SPDP ulang dan 2 perkara dengan SPDP baru. Dari 3 perkara yang diproses sepanjang tahun 2017 tersebut telah P-21, 2 dari perkara tersebut telah Penyerahan Tersangka dan BB ke JPU, 1 perkara lagi sedang menunggu proses penyerahan. Untuk 1 perkara dari yang telah diserahkan ke JPU hingga akhir 2017 sudah ada 1 perkara yang mendapatkan putusan pengadilan. Untuk perkara lain masih dalam proses persidangan.

Jika dibandingkan terhadap target tahun 2019, capaian kegiatan ini adalah 50%. Pada tahun 2016, realisasi kegiatan ini adalah 100 % sehingga terjadi penurunan realisasi jika dibandingkan tahun 2016.

Pencapaian indikator kegiatan tersebut didukung oleh kegiatan antara lain operasi – operasi Penyidikan yang dilakukan sesuai instruksi Pusat Penyidikan Obat dan Makanan serta kegiatan Intensifikasi produk sesuai instruksi dari Badan POM antara lain :

a. Operasi OPSON

Operasi OPSON merupakan instruksi dari Badan POM terkait kerjasama dengan Interpol dalam pengawasan produk pangan yang beredar di daerah. BPOM Pangkalpinang melakukan operasi terpadu tersebut pada tanggal 22-23 Maret 2017 di beberapa sarana di Kab. Bangka. Dari hasil pengawasan sarana distribusi Pangan tersebut tidak ditemukan temuan yang signifikan untuk tindakan pro-justisia sehingga hanya dilakukan Pembinaan terhadap sarana terkait pengawasan produk kadaluarsa dan rusak serta lebih menjaga sanitasi dan higienitas dari produk Pangan yang dijual.

b. Operasi Gabungan Daerah

Operasi Gabungan Daerah pada tahun 2017 dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 02-03 Mei 2017 dilaksanakan di Kab. Bangka bersama dengan pihak kepolisian Polda Kep. Babel, Polres Bangka dan Dinas Kesehatan Bangka, adapun temuan yang besar dalam proses ini sebanyak 3 kasus terkait Kosmetik TIE dan PW. Dari 3 kasus tersebut ada 1 yang dilakukan tindakan pro justisia dan 2 kasus lainnya hanya tindakan administratif berupa pemusnahan dikarenakan sarana merupakan sarana baru yang pertama kali diperiksa.

Operasi Gabungan Daerah selanjutnya dilakukan pada tanggal 21-24 Agustus 2017 di Kab. Belitung bersama dengan pihak kepolisian Polres Belitung dan petugas dari Satpol PP Belitung. Operasi ini dilakukan menindaklanjuti laporan dari anggota DPRD Kab. Belitung terkait

peredaran minuman beralkohol (arak putih) yang tidak sesuai ketentuan. Hasil dari operasi ini ditemukan 1 kasus produksi sekaligus distribusi pangan yang akhirnya dilakukan tindakan pro justisia.

c. Operasi Gabungan Nasional

Operasi Gabungan Nasional (OPGABNAS) dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 05-06 September 2017. Target pelaksanaan OPGABNAS kali ini adalah peredaran dan penyalahgunaan Obat ilegal. Pelaksanaan OPGABNAS ini dilakukan di Kab. Bangka Selatan dan Kota Pangkalpinang bersama dengan pihak Polda Kep. Bangka Belitung. Adapun temuan yang besar dalam proses ini sebanyak 1 kasus terkait Obat Tradisional PW dan mengandung BKO. Dari kasus tersebut dilakukan Gelar Kasus dan tidak dilakukan tindakan pro justisia, hanya tindakan administratif berupa pemusnahan dikarenakan sarana juga masih belum mengetahui apabila produk tersebut dinyatakan Public Warning.

d. Investigasi Awal

Kegiatan investigasi awal selama tahun 2017 cukup rutin dilakukan, antara lain untuk menindaklanjuti hasil pengawasan rutin yang dianggap mencurigakan dan juga menindaklanjuti laporan atau informasi dari masyarakat terkait peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan. Investigasi Awal di Balai POM Pangkalpinang tahun 2017 antara lain menelusuri peredaran Komix, penelusuran ke ekspedisi-ekspedisi yang berada di wilayah Kota Pangkalpinang, penelusuran peredaran Mie Korea yang mengandung DNA Babi, dan peredaran kosmetik palsu. Namun dari penelusuran itu ditemukan bahwa distribusi Mie Korea relatif aman dan tidak ditemukan peredarannya di wilayah Kep. Bangka Belitung. Dari hasil Investigasi Awal ini juga diketahui bahwa banyak peredaran Komix ke Toko Kelontong yang kemudian dijual bebas ke masyarakat yang kemudian terjadi penyalahgunaan konsumsi Komix. Hal ini akhirnya direspon oleh pihak Pemerintah Daerah dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur

terkait pembatasan peredaran Obat Bebas Terbatas yang tidak boleh dijual di Toko biasa dan hanya boleh dijual di Toko Obat dan Apotek.

e. Penyidikan tindak pidana obat dan makanan

Rincian perkara obat dan makanan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.5. Perkara Penyidikan Obat dan Makanan**

Target Perkara	Realisasi TA 2017								Keterangan
	SPDP	%	P-19	%	P-21	%	Putusan Pengadilan	%	
5	3	60 %	0	0 %	2	40%	1	20%	SPDP perkara baru TA 2017 sebanyak 2 perkara, SPDP ulang perkara lama sebanyak 1 perkara.

**SS 2 : Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah dan partisipasi masyarakat. Untuk itu perlu dijalin suatu kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang baik.

Sasaran kedua terdiri dari 2 indikator kinerja yang dapat dilihat pada Tabel

3.6

**Tabel 3.6. Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Pencapaian Sasaran Strategis 2.**

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
2	Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan Dengan Pemangku	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	82,00	82,04	100,05	Memuaskan

kepentingan, Partisipasi Masyarakat					
	2. Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	5	5	100	Memuaskan

Pencapaian sasaran tersebut di atas diukur dengan 2 (dua) indikator sebagai berikut :

### 1. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sejak akhir tahun 2011 Balai POM di Pangkalpinang sebagai unit kerja Badan POM RI di Provinsi Kep. Bangka Belitung telah menerapkan ISO 9001 : 2008. Tingkat Kepuasan Masyarakat dihitung dari hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat berupa kuisioner terhadap masyarakat yang mendapatkan Pelayanan berupa Informasi, pengaduan dan pengujian sampel. Realisasi Tingkat Kepuasan Masyarakat tahun 2017 adalah sebesar 82,04% dari target 82,00% atau dengan capaian 100,05% dan dikategorikan **Memuaskan**. Apabila kita membandingkan terhadap target akhir tahun Renstra 2019 (84,00%), capaiannya sudah mencapai 97,67%.

Tingkat Kepuasan Masyarakat tahun 2015, 2016 dan 2017 berturut-turut adalah 81,35 %; 81,43% dan 82,04%. Tingkat Kepuasan Masyarakat makin meningkat dari tahun ke tahun. Balai POM di Serang Tingkat Kepuasan Masyarakat sebesar 84,27%

Pencapaian indikator kinerja ini didukung dengan kegiatan-kegiatan :

- a. Tersedianya berbagai sarana untuk menghubungi ULPK yang data diakses oleh masyarakat baik tatap mukalangsung maupun via telepon, faksimili atau email. Dan media social.
- b. Kapasitas laboratorium yang memadai dan terakreditasi.
- c. Sarana dan prasarana pelayanan publik yang ada di Balai POM di Pangkalpinang ketersediaannya telah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal ULPK menurut Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.04.1.23.04.16.1769 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Layanan Pengaduan Konsumen di Lingkungan BPOM yaitu ruang tunggu, ruang pelayanan, meja pelayanan, kursi, komputer, toilet, tempat parkir, telepon, kepustakaan, lemari display, bahan promosi/produk informasi, ruang laktasi, area bermain anak dan televisi di ruang tunggu.
- d. Pendekatan pelayanan kepada masyarakat melalui pameran
- e. Peningkatan kompetensi SDM di bidang LIK.

Dalam meningkatkan capaian kinerja ini perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan atau rencana tindak lanjut antara lain :

- a. Peningkatan kompetensi petugas yang menangani layanan publik.
- b. Adanya petugas khusus yang melayani masyarakat di ULPK.
- c. Peningkatan sarana prasarana layanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Publik.

Pada Tahun 2017 dilakukan audit pelayanan publik oleh Kemenpan RB dan dinyatakan aspek-aspek pelayanan publik sudah mampu dipenuhi oleh BPOM Pangkalpinang.

**2. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan**

Hubungan yang baik dengan kabupaten/kota terus ditingkatkan dengan pertemuan, diskusi, ataupun workshop yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam pengawasan obat dan makanan dan merumuskan pola tindak lanjut dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan Propinsi/ kabupaten/ kota, Disperindag Propinsi/ Kabupaten/ Kota, Kantor perizinan Terpadu Priopinsi/Kabupaten/kota yang ada di propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Realisasi Indikator ini tahun 2017 adalah 5 dari target Jumlah Provinsi dan kabupaten/ kota sebanyak 5

**Tabel 3.7 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengalokasikan anggaran dalam pengawasan Obat dan Makanan**

No.	Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jenis Alokasi Anggaran
1	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Tim Terpadu
2	Kota Pangkalpinang	Tim Terpadu
3	Kabupaten Bangka Tengah	Pengujian sampel PNBP
4	Kabupaten Bangka Selatan	Pengujian sampel PNBP
5	Kabupaten Bangka	Pengujian sampel PNBP dan Tim Terpadu

Capaian indikator ini pada tahun 2017 adalah sebesar 100% dan dikategorikan Memuaskan. Apabila kita membandingkan terhadap target tahun 2019 (7), capaiannya adalah 71,43 %. Dari data tersebut masih diperlukan upaya – upaya peningkatan yang lebih untuk dapat mencapai target di akhir tahun Renstra.

Pada tahun 2016 diperoleh Realisasi sebesar 133,33% sedangkan Realisasi pada tahun 2017 sebesar 100%. Capaian indikator Jumlah

Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengalokasikan anggaran dalam pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Serang sebanyak 3

Pencapaian indikator kinerja ini didukung dengan kegiatan-kegiatan :

1. Advokasi dan koordinasi lintas sektor.
2. Pelayanan public termasuk pelayanan pengujian sampel PNBP.

Dalam meningkatkan capaian kinerja ini perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan atau rencana tindak lanjut antara lain :

1. Peningkatan advokasi dan koordinasi lintas sektor.
2. Peningkatan kualitas layanan publik terkait pengujian sampel PNBP.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Sasaran Strategis kedua ini didukung oleh beberapa kegiatan seperti tertera pada Tabel 3.8

Sasaran Kegiatan	Indikator		Target	Realisasi	% Capaian
Uraian	Uraian				
Meningkatnya Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	1	Jumlah Layanan Publik	170	428	251,76%
	2	Jumlah Komunitas Yang Diberdayakan	17	19	117,65%

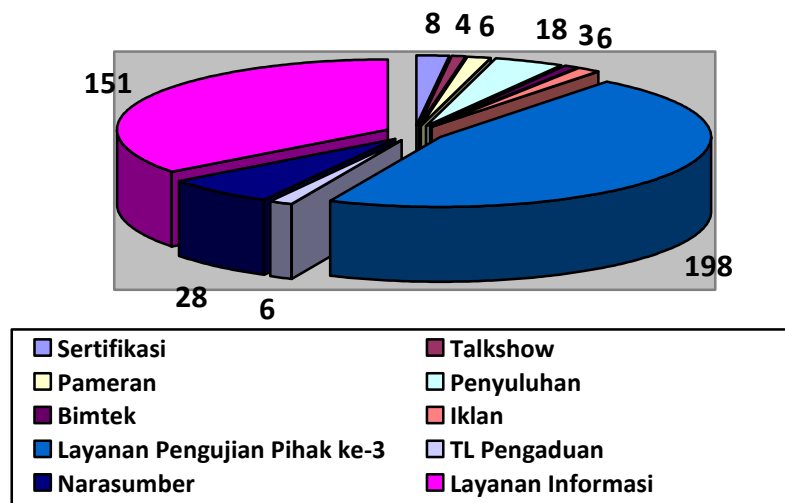
❖ Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Indikator :

1. Jumlah Layanan Publik

Pada tahun 2017, Balai POM di Pangkalpinang telah melakukan total 428 layanan publik. Layanan publik yang telah dilaksanakan yaitu, 8 sertifikasi, talkshow 4 kali, pameran 6 kali, penyuluhan 18 kali, bimtek 3 kali, iklan layanan masyarakat 6 kali, 198 sampel pihak ketiga, 151 kali layanan ULPK(informasi dan pengaduan) 28 kali sebagai narasumber dan tindak lanjut pengaduan 6 kali

### Jumlah Layanan Publik Tahun 2017



Gambar 3.9 Jumlah Layanan Publik Balai POM di Pangkalpinang

Dengan target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebanyak 428 layanan publik, maka capaian jumlah layanan publik Balai POM di Pangkalpinang sebesar 251,76 % termasuk kategori **tidak dapat disimpulkan**. Jumlah ini meningkat dari tahun 2015 dan 2016. Tingginya capaian jumlah layanan disebabkan penambahan jumlah masyarakat yang menggunakan layanan publik pengujian sampel dan permintaan informasi secara signifikan. Selain itu terkait dengan pencaangan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat maka BPOM Pangkalpinang menindaklanjuti dengan melakukan penyuluhan ke SMP dan SMA. Apabila kita membandingkan terhadap target akhir tahun Renstra 2019 (180) maka capaian kinerja indikator sudah mencapai 237,77 % atau melampaui target akhir tahun renstra sehingga perlu dilakukan review/ penyesuaian target.

Pencapaian indikator kinerja ini didukung dengan kegiatan-kegiatan :

- Tersedianya berbagai sarana untuk menghubungi ULPK yang data diakses oleh masyarakat baik tatap mukalangsung maupun via telepon, faksimili atau email dan media sosial.

- b. Sarana dan prasarana pelayanan publik yang ada di Balai POM di Pangkalpinang ketersediaannya telah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal ULPK menurut Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.04.1.23.04.16.1769 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Layanan Pengaduan Konsumen di Lingkungan BPOM yaitu ruang tunggu, ruang pelayanan, meja pelayanan, kursi, komputer, toilet, tempat parkir, telepon, kepustakaan, lemari display, bahan promosi/produk informasi, ruang laktasi, area bermain anak.
- c. Peningkatan kompetensi SDM di bidang LIK.

Dalam meningkatkan capaian kinerja ini perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan atau rencana tindak lanjut antara lain :

- a. Peningkatan kompetensi petugas yang menangani layanan public.
- b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi laboratorium pengujian
- c. Adanya petugas khusus yang melayani masyarakat di ULPK.
- d. Peningkatan sarana prasarana dan kecepatan layanan publik .

## 2. Jumlah Komunitas yang Diberdayakan

Pemberdayaan Komunitas dilakukan melalui 2 intervensi yaitu Gerakan Keamanan Pangan Desa dan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Selama tahun 2017, Balai POM di Pangkalpinang melakukan intervensi ke 3 (tiga) desa dalam kegiatan Gerakan Keamanan Pangan Desa di Kab. Bangka Selatan, yaitu Desa Tukak, Desa Batu Betumpang dan Kelurahan Tanjung Ketapang. Selain itu juga membina 2 komunitas Pasar dalam kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yaitu Pasar Kite ( Kabupaten Bangka) dan Pasar Berehun (Belitung) yang merupakan pasar daerah destinasi wisata. Pasar Berehun (Belitung) ini merupakan komunitas Pasar dengan alokasi Anggaran dari Badan POM

Gerakan Keamanan Pangan Desa bertujuan untuk Ketersediaan Pangan yang Aman, Bermutu dan Bergizi serta Pengembangan Ekonomi Desa.

Model kegiatan dengan cara mendorong kemandirian Komunitas Desa akan Keamanan Pangan di Desa.

Kegiatan ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

- Advokasi kelembagaan Desa dengan lintas sektor dan SKPD
- Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa
- Pengambilan Data GAP-Assessment
- Bimtek Keamanan Pangan untuk Komunitas Desa
- Fasilitasi Penerapan Keamanan Pangan Desa oleh Fasilitator
- Pengambilan Data Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan GKPD

Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya bertujuan mengendalikan penyalahgunaan bahan berbahaya ke dalam pangan. Kegiatan ini dilakukan sejak tahun 2013 di Pasar Lipat Kajang Belitung Timur dan Pasar Induk Tanjung Pandan. Pada tahun 2016 dilaksanakan di Pasar Rumput Pangkalpinang dan Tahun 2017 di Pasar Kite Bangka. Selain itu pada tahun 2017 dilaksanakan intervensi pasar daerah destinasi wisata yaitu Pasar Berehun di Belitung.

Dengan penambahan 5 komunitas sampai dengan tahun 2017 telah ada 20 komunitas yaitu 15 Desa dan 5 Pasar. Capaian jumlah komunitas yang berdayakan adalah 19 dari target 17 atau 111,76%. Capaian yang diperoleh untuk kegiatan ini termasuk kategori memuaskan. Capaian yang lebih tinggi dari target disebabkan program pasar aman baru dilaksanakan kembali pada tahun 2016 sesuai kenijakan BPOM RI sehingga belum terakomodir pada renstra sehingga dilakukan reviu pada tahun 2017. Dengan Capaian pada tahun 2017 sebanyak 19 maka tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap capaian dari Balai POM di Serang sebanyak 18 komunitas

**SS 3 : Meningkatkan Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM**

Sasaran Strategis ketiga terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 3.9.

**Tabel 3.9. Target dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
2	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP dari Badan POM	B (65)	BB (72,99)	112,29	Memuaskan

Nilai penerapan SAKIP dari Balai POM di Pangkalpinang berdasarkan penilaian dari Inspektorat Badan POM. Tahun 2016, Balai POM di Pangkalpinang memperoleh nilai BB (72,99) atau dengan capaian 112,29% dari target B (65). Capaian untuk indikator ini termasuk kategori Memuaskan.

Perbandingan Realisasi Nilai SAKIP tahun 2017 (BB) terhadap tahun 2016 (BB) menunjukkan konsistensi kinerja Balai POM di Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Jika dibandingkan dengan target Review Renstra tahun 2019 (BB) dengan nilai 75, Balai POM di Pangkalpinang harus terus melakukan peningkatan dan perbaikan baik dari sisi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal maupun capaian kinerja.

Pencapaian indikator kinerja diatas didukung oleh faktor – faktor antara lain :

- a. Adanya komitmen pimpinan dan staf Balai POM di Pangkalpinang untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

- b. Akuntabilitas kinerja Balai POM di pangkalpinang yang meningkat.
- c. Komitmen pimpinan dan staf Balai POM di Pangkalpinang dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- d. Meningkatnya integritas baik pimpinan maupun staf Balai POM di Pangkalpinang.

Dalam meningkatkan capaian Nilai SAKIP ini dan untuk dapat meraih nilai BB (75) di akhir periode renstra, upaya – upaya yang perlu dilakukan adalah :

- a. Komitmen bersama dari pimpinan dan staf Balai POM di Pangkalpinang harus selalu terjaga
- b. Implementasi Budaya Kerja Organisasi dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai visi dan misi Badan POM.
- c. Selalu meningkatkan manajemen dan akuntabilitas kinerja.
- d. Selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM terkait Akuntabilitas Kinerja dan reformasi Birokrasi.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Sasaran Strategis ketiga ini didukung oleh beberapa kegiatan seperti tertera pada Tabel 3.10

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Uraian	Uraian			
Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana sesuai Standar	77 %	69.69 %	90,5%
Penyusunan, Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan Tepat Waktu	10	10	100%

- ❖ Sasaran Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan

Indikator : Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana sesuai Standar

Indikator kinerja ini mencakup pemenuhan sarana dan prasarana kerja dan pemenuhan alat laboratorium. Untuk pemenuhan sarana prasarana kerja, realisasi tahun 2017 sebesar 66,11% terhadap Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Standar Sarana Prasarana Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan untuk pemenuhan alat laboratorium sebesar 73,27 % terhadap Standar Minimal Laboratorium sesuai Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.04.1.71.07.14.4437 tanggal 7 Juli 2014.

Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja pada tahun 2017 dilakukan melalui kegiatan – kegiatan antara lain :

- **Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran**

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan kesehatan resiko pekerjaan
- b. Pemeliharaan Gedung Kantor
- c. Pemeliharaan peralatan perkantoran
- d. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
- e. Pemeliharaan Kendaraan Roda4/6/10
- f. Pemeliharaan Kendaraan Roda 2
- g. Langganan Daya dan Jasa
- h. Perawatan Sarana Gedung
- i. Perbaikan Peralatan Fungsional
- j. Sewa Jaringan Telekomunikasi
- k. Administrasi Kegiatan

- **Pengadaan Peralatan dan Mesin**

Untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan mesin, pada tahun 2017 Balai POM di Pangkalpinang melaksanakan pengadaan terdiri

- ✓ Pengadaan Meubelier sebanyak 5 unit terdiri dari Brankas, Kursi Tamu, Sofa Kepala Balai dan Lemari ULPK.

- ✓ Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung terdiri sebanyak 9 unit AC, 3 Exhaust Fan, dan 1 unit CCTV.
- ✓ Pengadaan Alat Studio terdiri dari 1 unit Proyektor dan 1 unit Layar Proyektor
- ✓ Pengadaan Alat Pengolah Data sebanyak 3 unit Printer Portable

Pemenuhan Alat Laboratorium pada tahun 2017 dilakukan melalui kegiatan berikut :

- **Pengadaan Alat laboratorium**

Dalam rangka untuk memenuhi standar minimal laboratorium Balai POM di Pangkalpinang mengadakan Alat Laboratorium pada tahun anggaran 2017 sejumlah 36 unit berupa top loading timbangan mikro, pompa vakum, lemari asam, multispotter, sentrifuse, sentrifuse 15000RPM dengan pendingin, Thermohygrometer, TLC Sprayer, Pipette Controller, Drying Self, Pipette Washer, Multi Funnel Shaker, mli pippet, UPS 10 KVA, Aquadestilator, Ph/Ion Meter, electric Desicator, Microwave Digestor dan Autoclave

- **Pengadaan glassware dan suku cadang**

Kegiatan ini meliputi Pengadaan Glassware dan Pengadaan suku cadang, Untuk kegiatan ini ditargetkan masing-masing 1 (satu) paket dan semua terealisasi 100%. Pengadaan suku cadang dan glassware dilakukan dengan proses lelang Sederhana melalui LPSE.

- **Pengadaan Bufferstock reagen**

Pengadaan bufferstock reagen bertujuan untuk menyokong kebutuhan reagen agar pada pelaksanaan di tahun berjalan, pelaksanaan pengujian tidak terhambat dikarenakan ketidaktersediaan reagensia. Pengadaan bufferstock reagen pada tahun 2017 ditargetkan 1 (satu) paket dan terealisasi 100%. Pengadaan bufferstock reagensia dilakukan dengan proes Pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan.

Pada tahun 2017 realisasi indikator kinerja ini sebesar 69,69% atau terjadi penurunan dari realisasi tahun 2016 yang sebesar 77%. Hal ini disebabkan karena adanya Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Standar Sarana Prasarana Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang didalamnya mengandung aspek-aspek yang harus dipenuhi untuk Standar Sarana Prasarana Kerja yang baru diterapkan pada tahun 2017

Faktor – faktor yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini antara lain

- a. Pelaksanaan pengadaan sarana prasarana yang sesuai dengan rencana pengadaan walaupun penyelesaian pekerjaan masih di semester kedua tahun berjalan.
- b. Anggaran yang mendukung pemenuhan sarana prasarana.

Untuk meningkatkan capaian kinerja ini, perlu dilakukan upaya – upaya berikut :

- a. Komitmen pimpinan dan staf terkait perencanaan dan pengadaan di Balai POM di Pangkalpinang.
- b. Perencanaan pengadaan sarana prasarana yang lebih matang sehingga diharapkan pelaksanaan pengadaan dan pekerjaan kontrak dapat dilakukan di semester pertama tahun berjalan.
- c. Meningkatkan pelaksanaan pengadaan yang lebih akuntabel, efektif dan efisien.

❖ Sasaran Kegiatan : Penyusunan, Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan Tepat Waktu

Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan Tepat Waktu

Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen-dokumen yang selanjutnya dapat dijadikan pedoman pada pelaksanaan kegiatan satu tahun berjalan.

Realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2017 adalah sebanyak 10 dokumen dari target 10 dokumen. Dokumen yang dihasilkan adalah : Penetapan

Kinerja 2017, RKAKL/ DIPA 2018, LAKIP 2016, Laporan Triwulan I 2017, Laporan Triwulan II 2017, Laporan Triwulan III 2017, LAPTAH 2016, Laporan Keuangan 2016, Laporan Keuangan Semester I 2017.

Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2017 adalah sebesar 100% dan dikategorikan Baik. Capaian tahun 2017 jika dibandingkan terhadap target tahun 2019 adalah sebesar 100%.

Pada tahun 2016, realisasi indikator kinerja ini adalah 9 dokumen, namun target pada tahun 2019 adalah 9 dokumen. Terjadi peningkatan realisasi dan target pada tahun 2017 dikarenakan pada tahun 2017, adanya dokumen Renstra yang perlu dilaporkan.

Pencapaian indikator kinerja diatas didukung oleh faktor – faktor berikut :

- a. Komitmen pimpinan dan staf Balai POM di pangkalpinang
- b. Perencanaan program dan kegiatan
- c. Ketersediaan data dan informasi
- d. Kualitas dan kuantitas SDM terkait perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi.

Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja ini, hal-hal yang harus dilakukan oleh Balai POM di Pangkalpinang antara lain :

- a. Perencanaan program dan kegiatan yang lebih matang, terukur dan terarah.
- b. Menyiapkan ketersediaan data dan informasi yang cukup, valid dan akurat dalam rangka penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi.
- c. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM terkait perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi.

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2017 Balai POM di Pangkalpinang memperoleh anggaran sebesar Rp 14.921.792.000. Secara garis besar pelaksanaan aspek keuangan ini telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip laporan yang lazim, dan pertanggungjawabannya diupayakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, hemat, efisien dan efektif dengan menghindari penyalahgunaan.

Secara umum, realisasi anggaran Balai POM di Pangkalpinang sudah cukup baik yaitu sebesar 87,43% (sebelum self blocking) dan 94,50% (setelah self blocking). Bila dibandingkan dengan realisasi anggaran Badan POM secara nasional yaitu sebesar 87,86% (sebelum self blocking) dan 94,97% (setelah self blocking) maka realisasi Balai POM di Pangkalpinang lebih tinggi dari realisasi Badan POM sebelum self blocking namun lebih rendah bila dibandingkan setelah self blocking. Self blocking pada anggaran Balai POM di Pangkalpinang sebesar Rp. 990.293.000. Apabila dilihat dari sasaran, anggaran dan realisasi anggaran Balai POM di Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.11. Realisasi anggaran tiap sasaran (sebelum self blocking)**

SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	% PENGGUNAAN
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Rp. 3.285.795.000	Rp. 2.662.564.538	81,03
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Rp. 2.207.252.000	Rp. 1.627.865.306	73,75

<b>Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM</b>	Rp. 7.734.659.000	Rp. 7.274.616.520	94,05
<b>TOTAL</b>	Rp 13.227.706.000	Rp 11.565.046.364	87,43

**Tabel 3.12. Realisasi anggaran tiap sasaran (setelah self blocking)**

<b>SASARAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% PENGGUNAAN</b>
<b>Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan</b>	Rp. 3.100.985.000	Rp. 2.662.564.538	85,86
<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</b>	Rp 1.687.033.000	Rp1.627.865.306	96,49
<b>Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM</b>	Rp. 7.44.395.000	Rp. 7.274.616.520	97,65
<b>TOTAL</b>	Rp 12.237.413.000	Rp 11.565.046.364	94,50

Dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah anggaran berbeda dengan pagu anggaran BPOM di Pangkalpinang tahun 2017, hal ini disebabkan pada pengukuran akuntabilitas keuangan tidak termasuk anggaran yang tidak berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran, yaitu Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 2.684.379.000

Alokasi anggaran terbesar yaitu pada sasaran yang ketiga yaitu " Menguatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Badan POM", hal ini dikarenakan pemenuhan standar alat laboratorium yang merupakan belanja modal memerlukan alokasi anggaran yang cukup besar karena nilai alat laboratorium cukup mahal.

Dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran, hal – hal yang perlu dilakukan oleh Balai POM di Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan komitmen pimpinan dan staf terkait pelaksanaan anggaran yang akuntabel, efektif dan efisien.
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran
- c. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.
- d. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM terkait perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi anggaran.

### 3.3 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Fokus pengukuran efisiensi kegiatan adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\ &= \frac{100\%}{100\%} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika  $IE \geq SE$ , maka kegiatan dianggap efisien  
Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dalam hal pengukuran ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Pada tahun 2017, dari 21 kegiatan secara umum dapat dilaksanakan dengan efisien akan tetapi ada 2 kegiatan yang tidak efektif dalam pelaksanaannya yaitu:

1. Penyelidikan dan Penyidikan
2. Pengadaan Bangunan dan Gedung

Pengadaan Bangunan dan Gedung dalam Anggaran DIPA 2017 adalah Renovasi Laboratrium Mikrobiologi dimana dalam tahun berjalan adanya Self Bloking mengakibatkan Kegiatan ini tidak bisa direalisasikan

Untuk menghindari terjadinya kegiatan – kegiatan yang tidak efisien, perlu dilakukan upaya – upaya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran
- b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran
- c. Komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dengan pusat/kedeputian terkait pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh pusat/kedeputian.

## BAB 4. PENUTUP

Balai POM di Pangkalpinang sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja. Tahun 2017 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Balai POM di Pangkalpinang 2015-2019. Secara garis besar, pencapaian kinerja Balai POM di Pangkalpinang Tahun 2017 dari 3 sasaran strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 dengan 5 indikator kinerja utama terdapat 4 indikator dengan yang capaian kategori memuaskan (indikator 1,2,3 dan 5), 1 indikator dengan capaian kategori cukup yaitu (indikator 4). Pada 5 indikator kinerja utama, 4 indikator mencapai target dan 1 indikator tidak mencapai target.
2. Sasaran strategis 2 terdapat 2 indikator dengan dengan capaian kategori memuaskan
3. Sasaran Strategis nomor 3 terdapat 1 indikator kinerja dengan capaian termasuk kategori memuaskan.

Dengan pencapaian kinerja tersebut, Balai POM di Pangkalpinang telah melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan kinerja pada masa mendatang.

Dari 21 komponen kegiatan dan subkegiatan telah dilaksanakan dengan efisien.

Beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Balai POM di Pangkalpinang antara lain adalah :

1. Perkuatan kapasitas dan kapabilitas SDM dan Laboratorium.
2. Memperketat pengawasan produk Obat dan Makanan terutama untuk produk yang tidak memenuhi syarat.
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat.
4. Perkuatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
5. Peningkatan penerapan sistem manajemen mutu QMS 9001 dan ISO 17025 secara konsisten dan berkesinambungan.
6. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor sehingga meningkatkan efektifitas pengawasan produk Obat dan Makanan.

Selanjutnya diharapkan semua pegawai di Balai POM di Pangkalpinang tetap memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kinerja masing-masing individu sehingga capaian kinerja Balai POM di Pangkalpinang dapat terus meningkat.

Lampiran 1  
**RENCANA STRATEGIS**  
**BALAI POM DI PANGKALPINANG**  
**TAHUN 2015-2019**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Baseline	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
<b>Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang</b>								
	<b>SS 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>							
	1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	92.00	92.00	92.50	93.00	93.50	94.00
	1.2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	69.72	70.00	71.00	72.00	73.00	74.00
	1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	86.73	87.00	88.00	89.00	90.00	91.00
	1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	78.00	79.00	80.00	81.00	82.00	83.00
	1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	84.32	84.50	85.00	85.50	86.00	86.50
	<b>SS 2 Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan</b>							
	2.1 Tingkat Kepuasan Masyarakat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	79.33	80.00	81.00	82.00	83.00	84.00
	2.2 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	1.00	3.00	5.00	7.00	7.00
	<b>SS 3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM</b>							
	3.1 Nilai SAKIP Balai POM di Pangkalpinang dari Badan POM	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	B	B	B	A	A
<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>								
	<b>SP 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>							
	1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	92.00	92.00	92.50	93.00	93.50	94.00
	1.2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	69.72	70.00	71.00	72.00	73.00	74.00

	1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	86.73	87.00	88.00	89.00	90.00	91.00
	1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	78.00	79.00	80.00	81.00	82.00	83.00
	1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	84.32	84.50	85.00	85.50	86.00	86.50
	1.6. Persentase pangan fortifikasi makanan yang memenuhi ketentuan	Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara						
	<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, SP 2 kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat</b>							
	2.1 Tingkat Kepuasan Masyarakat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	79.33	80.00	81.00	82.00	83.00	84.00
	2.2 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	1.00	3.00	5.00	7.00	7.00
	<b>SP 3 Meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan BPOM</b>							
	3.1 Nilai SAKIP Balai POM di Pangkalpinang dari Badan POM	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	B	B	B	A	A
<b>Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Pangkalpinang</b>								
	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia							
	1 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	750	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	100	100	100	100	100
	3 Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	100	100	100	100	100
	4 Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	33.69	34.03	34.36	34.70	35.04	35.37
	5 Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4	4	5	5	6	6
	6 Jumlah layanan publik Balai POM di Pangkalpinang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	160	160	165	170	175	180
	7 Jumlah Komunitas yang diberdayakan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	8	11	14	17	20	23
	8 Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	75.01	76.16	77.00	78.00	79.00	80.00
	9 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10	10	9	10	9	10

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
BALAI POM DI PANGKALPINANG**

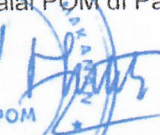
NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	93,00 %
		2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	72,00 %
		3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	89,00 %
		4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81,00 %
		5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	85,50 %
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	82,00 %
		2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	5
3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP dari BPOM	B
<b>Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	1.000
		2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100 %
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100 %
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	34,70 %
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	5
<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</b>			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1. Jumlah layanan publik BB/BPOM	170
		2. Jumlah komunitas yang diberdayakan	17
<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai BPOM</b>			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	78,0 %
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10

**Kegiatan**  
Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Pangkalpinang

**Anggaran**  
Rp. 15.912.085.000

Pangkalpinang, 6 Januari 2017.

Kepala Badan POM  
  
Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Kepala Balai POM di Pangkalpinang  
  
Dra. Rossy Hertati, Apt., M.P.

**Lampiran 3**  
**PERJANJIAN KINERJA**  
**TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II/BALAI BESAR/BALAI POM**

**UNIT ORGANISASI : BALAI POM di PANGKALPINANG**  
**TAHUN ANGGARAN : 2017**

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	<b>Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan</b>	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	93.00%
		2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	72.00%
		3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	89.00%
		4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81.00%
		5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	85.50%
2	<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</b>	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	82.00%
		2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	5
3	<b>Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM</b>	Nilai SAKIP dari BPOM	B
<b>Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	1000
		2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100%
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100%
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	34.70%
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	5
<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</b>			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1. Jumlah layanan publik BB/BPOM	170
		2. Jumlah komunitas yang diberdayakan	17
<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM</b>			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	78.00%
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10

**Kegiatan**

Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Pangkalpinang

**Anggaran**

Rp. 14.921.792.000

**Lampiran 4**  
**PERJANJIAN KINERJA**  
**TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II/BALAI BESAR/BALAI POM**

UNIT ORGANISASI : BALAI POM di PANGKALPINANG  
TAHUN ANGGARAN : 2017

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	93.00%	98.12%	105.51%
		2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	72.00%	86.30%	119.86%
		3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	89.00%	97.35%	109.38%
		4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81.00%	76.47%	94.41%
		5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	85.50%	98.50%	115.20%
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	82.00%	82.04%	100.05%
		2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	5	5	100.00%
3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP dari BPOM	B	BB	
<b>Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>					
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	1000	996	99.60
		2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100%	94.44%	94.44
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100%	103.85%	103.85
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standard	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	34.70%	35.63%	102.68
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	5	3	60
<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</b>					
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1. Jumlah layanan publik BB/BPOM	170	428	251.76
		2. Jumlah komunitas yang diberdayakan	17	20	117.65
<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM</b>					
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	78.00%	69.69%	89.35
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	10	100

Kegiatan

Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Pangkalpinang

Anggaran

Rp. 14.921.792.000

**Lampiran 5**  
**Pengukuran Kinerja Kegiatan**  
**BALAI POM DI PANGKALPINANG**

Unit Organisasi : Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang  
Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis		Kegiatan		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR	TARGET SEBELUM SELF BLOCKING	TARGET SETELAH SELF BLOCKING	REALISASI	PENCAPAIAN* (%)
Uraian		Uraian						
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1	Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan	Input : Dana	Rp624.641.000	Rp619.631.000	Rp538.849.058	86.96
				Output : Jumlah sampel	1020 Sampel	1020 Sampel	996 sampel	97.65
		2	Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, napza, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	Input : Dana	Rp75.642.000	Rp75.642.000	Rp56.404.062	74.57
				Output : Jumlah Sarana Produksi yang diawasi	52 sarana	52 sarana	54 sarana	103.85
		3	Pengawasan sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, napza, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	Input : Dana	Rp527.224.000	Rp475.309.000	Rp415.104.088	87.33
				Output : Jumlah Sarana Distribusi yang diperiksa	618 sarana	618 sarana	630 sarana	101.94
		4	Penyidikan dan Penyelidikan	Input : Dana	Rp383.986.000	Rp359.386.000	Rp216.874.432	60.35
				Output : Jumlah Kasus yang ditindak lanjuti	5 Perkara	5 Perkara	3 Perkara	60.00
		5	Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang Obat dan Makanan	Input : Dana	Rp323.597.000	Rp190.062.000	Rp158.363.040	83.32
				Output : Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.00
		6	Peningkatan Kompetensi Petugas pemeriksaan Sarana Distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, napza, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	Input : Dana	Rp362.685.000	Rp401.057.000	Rp379.817.903	94.70
				Output : Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100.00
		7	Peningkatan kompetensi petugas di bidang laboratorium	Input : Dana	Rp336.320.000	Rp333.187.000	Rp305.838.074	91.79
				Output : Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100.00
8	Evaluasi/ konsultasi/ koordinasi untuk	Input : Dana	Rp112.140.000	Rp72.926.000	Rp67.738.500	92.89		

			pengelolaan dan peningkatan kinerja di laboratorium	Output : Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100.00
		9	Peningkatan Kemampuan Fungsi/ Kapasitas/ Teknis Laboratorium	Input : Dana	Rp539,560,000	Rp573,785,000	Rp523,575,381	91.25
				Output : Jumlah Dokumen yang dihasilkan	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100.00
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1	Penyelenggaraan sosialisasi/ workshop/ diseminasi/ seminar/ publikasi/ penyuluhan	Input : Dana	Rp881,434,000	Rp682,281,000	Rp668,308,435	97.95
				Output : Jumlah penyelenggaraan sosialisasi/workshop/diseminasi /seminar / publikasi / penyuluhan yang terlaksana	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	100.00
		2	Desa atau kelurahan yang diintervensi program keamanan Pangan	Input : Dana (DESA)	Rp852,095,000	Rp657,595,000	Rp628,662,160	95.60
				Output : Jumlah Desa atau Kelurahan yang diintervensi program keamanan Pangan	3 desa	3 desa	3 desa	100.00
				Input : Dana (PASAR)	Rp237,350,000	Rp209,044,000	Rp197,963,450	94.70
				Jumlah Pasar yang diintervensi	1 Pasar	1 Pasar	2 Pasar	200.00
		3	Peningkatan Kompetensi petugas LIK	Input : Dana	Rp135,693,000	Rp80,917,000	Rp80,516,861	99.51
				Output : Jumlah pegawai yang ditingkatkan kompetensinya	3 orang	3 orang	3 orang	100.00
		4	Evaluasi/ konsultasi/ koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja di bidang layanan informasi dan pengaduan	Input : Dana	Rp100,680,000	Rp57,196,000	Rp52,414,400	91.64
				Output : Jumlah kegiatan evaluasi/ konsultasi / koordinasi dibidang LIK yang terlaksana	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00
3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	1	Peralatan dan Mesin	Input : Dana	Rp217,380,000	Rp217,380,000	Rp209,395,000	96.33
				Output : Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	3 unit	3 unit	3 unit	100.00
		2	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Input : Dana	Rp1,573,621,000	Rp1,573,621,000	Rp1,523,158,273	96.79

		Output : Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang diadakan	1 paket	1 paket	1 paket	100.00
3	Sarana dan Pra sarana Terkait Pengawasan Obat dan Makanan (Pengadaan pakaian dinas)	Input : Dana	Rp71,875,000	Rp71,875,000	Rp71,875,000	100.00
		Output : Jumlah sarana	73 stel	73 stel	73 stel	100.00
4	Pengadaan alat laboratorium	Input : Dana	Rp3,545,076,000	Rp3,545,076,000	Rp3,493,870,800	98.56
		Output : Jumlah Pengadaan alat laboratorium	37 unit	37 unit	43 unit	116.22
5	Pengadaan Bangunan dan Gedung	Input : Dana	Rp199,120,000			
		Output : Bangunan dan Gedung	1 paket			
6	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Input : Dana	Rp976,967,000	Rp949,496,000	Rp885,066,947	93.21
		Output : Jumlah Dokumen yang dihasilkan	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100.00
7	Pengadaan glassware dan suku cadang	Input : Dana	Rp951,350,000	Rp892,677,000	Rp892,287,000	99.96
		Output : Jumlah pengadaan glassware dan suku cadang	2 paket	2 paket	2 paket	100.00
8	Pengadaan buffer stock reagensia	Input : Dana	Rp199,270,000	Rp199,270,000	Rp198,963,500	99.85
		Output : Jumlah Pengadaan Buffer stock reagensia	1 paket	1 paket	1 paket	100.00
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp13,227,706,000</b>	<b>Rp12,237,413,000</b>	<b>Rp11,565,046,364</b>	<b>94.51</b>

**Lampiran 6**  
**Pengukuran Efisiensi Kegiatan**  
**BALAI POM DI PANGKALPINANG**

Unit Organisasi : Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang  
Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis		Kegiatan		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE		
				INPUT (%)	OUTPUT (%)						
Uraian		Uraian									
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1	Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan	Rp619,631,000	Rp538,849,058	86.96	97.65	1.12	1	Efisien	0.12
		2	Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, napza, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	Rp75,642,000	Rp56,404,062	74.57	103.85	1.39	1	Efisien	0.39
		3	Pengawasan sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, napza, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	Rp475,309,000	Rp415,104,088	87.33	101.94	1.17	1	Efisien	0.17
		4	Penyidikan dan Penyelidikan	Rp359,386,000	Rp216,874,432	60.35	60.00	0.99	1	Tidak Efisien	-0.01
		5	Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang Obat dan Makanan	Rp190,062,000	Rp190,062,000	100.00	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
		6	Peningkatan Kompetensi Petugas pemeriksaan Sarana Distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, napza, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	Rp401,057,000	Rp379,817,903	94.70	100.00	1.06	1	Efisien	0.06
		7	Peningkatan kompetensi petugas di bidang laboratorium	Rp333,187,000	Rp305,838,074	91.79	100.00	1.09	1	Efisien	0.09

Sasaran Strategis		Kegiatan			RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE	
		8	Evaluasi/ konsultasi/ koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja di laboratorium	Rp72.926,000	Rp67.738,500	92.89	100.00	1.08	1	Efisien	0.08
		9	Peningkatan Kemampuan Fungsi/ Kapasitas/ Teknis Laboratorium	Rp573,785,000	Rp523,575,381	91.25	100.00	1.10	1	Efisien	0.10
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakatkapabilitas terunggul di Provinsi Bangka Belitung	1	Penyelenggaraan sosialisasi/ workshop/ diseminasi/ seminar/ publikasi/ penyuluhan	Rp682,281,000	Rp668,308,435	97.95	100.00	1.02	1	Efisien	0.02
		2	Desa atau kelurahan yang diintervensi program keamanan Pangan	Rp657,595,000	Rp628,662,160	95.60	100.00	1.05	1	Efisien	0.05
		3	Peningkatan Kompetensi petugas LK	Rp80,917,000	Rp80,516,861	99.51	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
		4	Evaluasi/ konsultasi/ koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja di bidang layanan informasi dan pengaduan	Rp57,196,000	Rp52,414,400	91.64	100.00	1.09	1	Efisien	0.09
3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	1	Pengadaan Peralatan da Mesin	Rp217,380,000	Rp209,395,000	96.33	100.00	1.04	1	Efisien	0.04
		2	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Rp1,573,621,000	Rp1,523,158,273	96.79	100.00	1.03	1	Efisien	0.03
		3	Sarana dan Pra sarana Terkait Pengawasan Obat dan Makanan (Pengadaan pakaian dinas)	Rp71,875,000	Rp71,875,000	100.00	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
		4	Pengadaan alat laboratorium	Rp3,545,076,000	Rp3,493,870,800	98.56	116.22	1.18	1	Efisien	0.18

Sasaran Strategis		Kegiatan			RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE	
		5	Pengadaan Bangunan dan Gedung	Rp199,120,000	Rp0	0.00	0.00	0.00	1	Tidak Efisien	-1.00
		6	Dokumen Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi	Rp949,496,000	Rp885,066,947	93.21	100.00	1.07	1	Efisien	0.07
		7	Pengadaan glassware dan suku cadang	Rp892,677,000	Rp892,287,000	99.96	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
		8	Pengadaan buffer stock reagensia	Rp199,270,000	Rp198,963,500	99.85	100.00	1.00	1	Efisien	0.00

